



RENSTRA 2024-2026

DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat karunia serta ridhoNya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 telah dapat tersusun. Dalam penyusunannya, Renstra telah melewati berbagai tahap dan kegiatan dari mulai permusan masalah dan isu strategis, penyiapan Tujuan, Arah Kebijakan, Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yang keseluruhannya diselaraskan dengan RPD 2024-2026.

Keseluruhan proses penyusunan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 dilakukan melalui forum-forum pembahasan dan diskusi dengan pemangku kepentingan dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat terhadap kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang di masa yang akan datang, serta melalui rapat-rapat koordinasi internal yang melibatkan para pimpinan di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang terkait dalam urusan Sosial, Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 secara keseluruhan terdiri dari 5 (lima) bagian pembahasan yang meliputi:

1) Pendahuluan (menyajikan tentang kondisi umum, landasan hukum, potensi dan permasalahan); 2) Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah; 3) Tujuan, Sasaran, Arah Strategi dan Arah Kebijakan; 4) Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaa; dan 5) Penutup.

Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 sudah melalui forum penelaahan Bappeda Kota Padang Panjang dalam memastikan bahwa: 1). Program, dan Kegiatan konsisten dengan kebijakan nasional dalam RPJMN dan prioritas daerah dalam rancangan RPD; 2). Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan mendukung pencapaian sasaran pembangunan dalam rancangan



RPD; 3). Kesesuaian Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan dengan kebijakan pengembangan wilayah dalam rancangan RPD; 4). Muatan rancangan Renstra sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; 5). kesesuaian Program dan Kegiatan dengan pembagian urusan kewenangan pusat-daerah; 6). keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis, program dan sasaran program, kegiatan dan sasaran kegiatan, kesesuaian sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan; 7). kebutuhan sumber daya telah sesuai dengan kondisi ekonomi makro yang terdapat dalam rancangan RPD.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam Penyusunan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Semoga dokumen ini dapat dipahami serta dimanfaatkan dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan pembangunan bidang Sosial, Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Padang Panjang, khususnya untuk periode 3 tahun mendatang.

Padang Panjang, 14 April 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PADANG PANJANG**

Drs. OSMAN BIN NUR, M. Si

PEMBINA UTAMA MUDA, NIP. 199690120 198902 1 001



DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Landasan Hukum	I - 3
1.3. Maksud dan Tujuan	I - 7
1.4. Sistematika Penulisan	I - 8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II - 1
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perangkat Daerah	II - 1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II - 7
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II - 9
2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II - 34
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III - 1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	III - 1
3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	III - 12
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang	III - 21
3.4. Telaahan Terhadap RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026	III - 23
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	III - 25
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV - 1
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ...	IV - 1
4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah	IV - 3
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V - 1



BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN	VI – 1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII – 1
BAB VIII	PENUTUP	VIII – 1
	8.1. Pedoman Transisi	VIII – 1
	8.2. Kaidah Pelaksanaan	VIII – 1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2023	II – 7
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Perangkat Daerah Tahun 2023	II – 8
Tabel 2.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2023 ..	II – 8
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2019 – 2022	II – 10
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2019-2022	II – 13
Tabel 2.6	Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Di Kota Padang Panjang Tahun 2017-2022	II – 20
Tabel 2.7	Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2022	II – 21
Tabel 2.8	Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2020-2022	II – 22
Tabel 2.9	Perbandingan Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Kota Padang Panjang dengan kota lain di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000, 2010 dan 2020	II – 31
Tabel 3.1	Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026	III – 16
Tabel 3.2	Telaahan Renstra Dinas P3AP2KB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	III – 17
Tabel 3.3	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Sosial PPKB	III – 23



PPPA Kota Padang Panjang ditinjau dari Implikasi RTRW dan KLHS

Tabel 3.4	Telaahan Terhadap RPD Kota Padang Panjang dengan Renstra Dinas Sosial PPKB PPPA	III – 24
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026	IV – 2
Tabel 5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026	V – 2
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial PPKB PPPA Tahun 2024-2026	VI – 2
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang yang Mengacu pada RPD Tahun 2024 – 2026	VII – 2



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2	Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang	I – 2
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang	II – 6
Gambar 2.2	Angka PPKS Kota Padang Panjang Tahun 2018-2021	II – 21
Gambar 2.3	Jumlah PPKS yang Tertangani Tahun 2019-2022	II – 23
Gambar 2.4	Grafik Persandingan Capaian IPG Kota Padang Panjang dengan IPG Provinsi	II – 24
Gambar 2.5	Grafik Persandingan Capaian IPG Kota Padang Panjang dengan IPG Provinsi dan IPG Nasional	II – 25
Gambar 2.6	Grafik Persandingan Capaian IPG Kota Padang Panjang dengan IPG Kab/Kota Lainnya	II – 25
Gambar 2.7	IDG Kota Padang Panjang 2017-2021	II – 26
Gambar 2.8	IDG Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021	II – 27
Gambar 2.9	Rata-rata Jumlah Anak Per-Keluarga Kota Padang Panjang Tahun 2019-2022	II – 32
Gambar 2.10	Rasio Akseptor KB Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II – 33
Gambar 2.11	Prevalensi Stunting Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	II – 34
Gambar 3.1	Pohon Masalah Urusan Sosial	III – 5
Gambar 3.2	Pohon Masalah Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	III – 8
Gambar 3.3	Pohon Masalah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	III – 11
Gambar 4.1	Cascading Renstra Dinas Sosial PPKB PPPA Kota Padang Panjang Tahun 2024 – 2026 Urusan Sosial	IV – 4
Gambar 4.2	Cascading Renstra Dinas Sosial PPKB PPPA Kota Padang Panjang Tahun 2024 – 2026 Urusan Pemberdayaan Perempuan	



	dan Perlindungan Anak	IV – 5
Gambar 4.3	Cascading Renstra Dinas Sosial PPKB PPPA Kota Padang Panjang Tahun 2024 – 2026 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	IV – 6



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

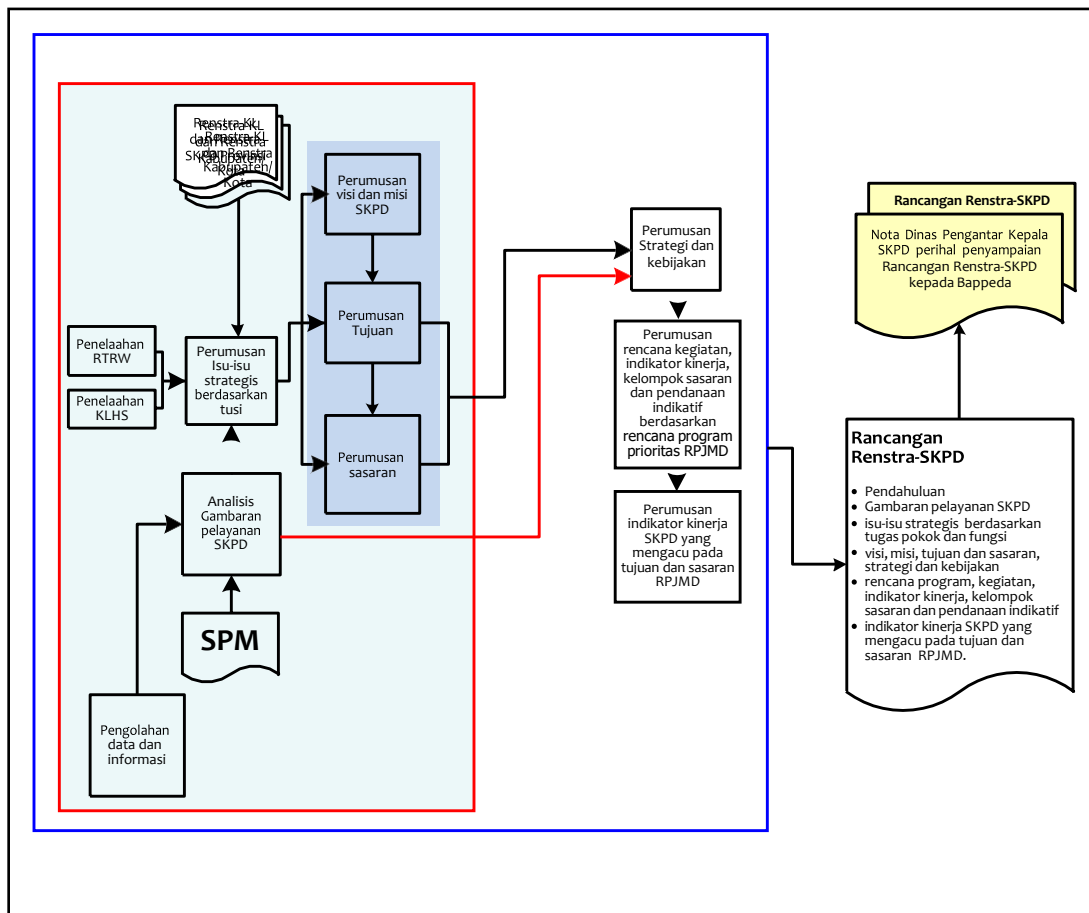
Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, diinstruksikan agar Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Pejabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Sosial Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 tidak jauh beda dengan penyusunan Renstra sebelum-sebelumnya. Tahapan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dapat digambarkan dalam bagan alur sebagai berikut:



Gambar 1.2
Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Sosial
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kota Padang Panjang



Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tiga tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam

pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 *Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 *Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
11. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah,



- Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak;
16. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara;
 17. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 18. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
 19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
 20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 21. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 22. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin;
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Cacat;
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga;
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;



30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang;
33. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan;
34. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
35. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
36. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
37. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
38. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan



Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
45. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
46. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025;
47. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005- 2025;
48. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
49. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah;
50. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025;
51. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032;
52. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
53. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang
54. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 – 2026;

1.3 Maksud dan Tujuan



Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang adalah untuk menyediakan dokumen yang dapat dijadikan arah dan pedoman bagi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mewujudkan keterpaduan dan kebersamaan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang, yaitu sebagai berikut:

1. Menetapkan arah pembangunan dibidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2024-2026.
2. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Renja.
3. Mewujudkan sinergitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.
4. Menyediakan tolok ukur dalam pencapaian kinerja pembangunan daerah dalam kurun waktu 2024-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah serta kelompok sasaran layanan..

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah



Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah berdasarkan Sasaran dan Indikator serta Target Kinerja dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah, Cascading kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya masing-masing.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah.



Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan perangkat daerah.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK beserta targetnya dikhususkan bagi PD pemangku urusan pemerintahan daerah.

Bab VIII Penutup



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi, berpedoman kepada Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berikut adalah Susunan organisasi perangkat daerah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas;



2. Sekretaris;
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
4. Kepala Bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial;
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Tugas dan fungsi pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk melaksanakan tugasnya, kepala dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

2. Sekretariat

Sekretariat dikepalai oleh Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. merencanakan operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja Dinas Sosial Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang dilaksanakan



- berjalan efisien dan efektif;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan program kerja untuk pelaksanaan tugas;
 - f. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan di Sub Bagian Keuangan sesuai dengan program kerja untuk pelaksanaan tugas;
 - g. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan program kerja untuk pelaksanaan tugas;
 - h. merancang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat berdasarkan perbandingan rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
 - j. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat berdasarkan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan.
3. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
- Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin yang dikepalai oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Pemberdayaan Sosial, Kelembagaan dan Penanganan Fakir Miskin yang meliputi Pemberdayaan Sosial, Pemberdayaan Kelembagaan dan Kemitraan Sosial, serta Penanganan Fakir Miskin. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang



- pemberdayaan kelembagaan, sosial masyarakat dan restorasi sosial;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang pendampingan, bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
 - c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang penanganan fakir miskin;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
4. Bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial
- Bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial yang dikepalai oleh Kepala Bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial yang meliputi Pelayanan dan Bantuan Sosial, Penanganan Masalah Sosial, serta Rehabilitasi dan Jaminan Sosial. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - b. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan bantuan sosial;
 - c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penanganan masalah sosial;
 - d. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program rehabilitasi dan jaminan sosial;
 - e. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan langsung; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dikepalai oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang advokasi dan fasilitasi Pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pemberdayaan dan



- perlindungan anak;
 - b. pemberian dukungan, dan penganggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang advokasi dan fasilitasi pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pemberdayaan dan perlindungan anak;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang advokasi dan fasilitasi pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pemberdayaan dan perlindungan anak; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
6. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dikepalai oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberi dukungan atas pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi, berpedoman kepada Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berikut adalah Susunan organisasi perangkat daerah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;

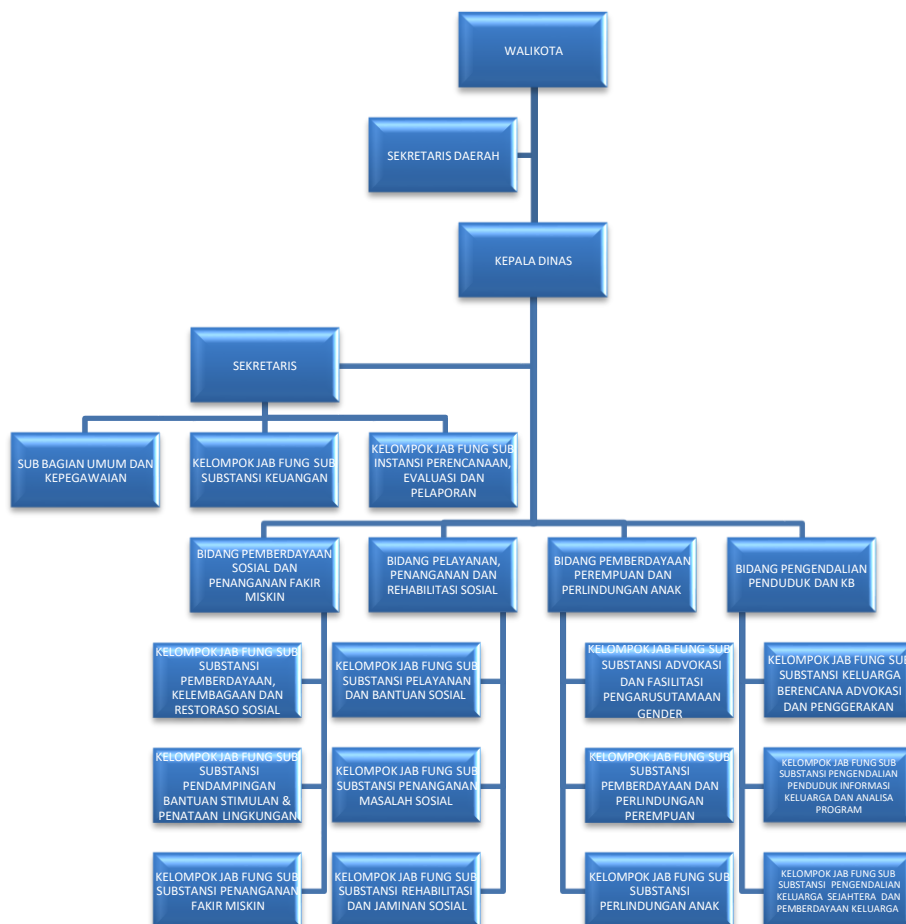


3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
4. Kepala Bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial;
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Selanjutnya Struktur Organisasi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dapat dilihat pada Gambar 2.1 dibawah ini.

Gambar 2.1

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PADANG PANJANG**



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pegawai Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang berjumlah 55 orang terdiri dari 35 orang PNS dan 20 orang Non PNS. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Padang Panjang Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	PNS			Non PNS		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	SMP Sederajat	1	-	1	3	1	4
2	SMA Sederajat	3	3	6	11	5	16
3	D3	1	3	4	1	2	3
4	S1	4	19	23	2	7	9
5	S2	2	1	3	-	-	-
6	S3	-	-	-	-	-	-
Jumlah		11	26	37	17	15	32
		69					

Sumber : Bezzeting Pegawai Tahun 2023

Dari 37 (tiga Puluh tujuh) orang PNS Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang, pegawai dengan pendidikan terbanyak adalah pegawai dengan pendidikan S1 sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, sementara untuk Pegawai Non PNS pegawai dengan pendidikan terbanyak adalah berpendidikan SMA/ sederajat yaitu sebanyak 16 (enam belas) orang.

PNS pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang adalah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang yang terdiri dari golongan IV 6 orang, Golongan III 24 orang dan Golongan II 5 orang.



Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Tahun 2023

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	1	-	1
2	Golongan II	2	-	2
3	Golongan III	7	21	28
4	Golongan IV	2	4	6
	Jumlah	12	25	37

Sumber : Bezzeting Pegawai Tahun 2023

Dari tabel 2.2 diatas dapat dilihat bahwa persentase pegawai tertinggi adalah pegawai dengan golongan III yaitu 75,67%.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dilengkapi dengan asset yang terdiri dari peralatan dan perlengkapan. Adapun asset yang dimiliki Dinas Sosial Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang
Tahun 2023

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi		
				Baik	Kurang Baik	Rusak
1	Stasion Wagon	7	Unit	5	2	-
2	Micro Bus	2	Unit	1	-	1
3	Isuzu NKR	1	Unit	-	1	-
4	Pick Up	1	Unit	-	1	-
5	Sepeda Motor	32	Unit	30	2	-
6	Komputer PC	26	Unit	20	-	6
8	Laptop	16	Unit	9	-	7
10	Printer	24	Unit	8	-	16
12	Meja kerja	42	Unit	35	2	5
13	Kursi kerja	42	Unit	30	10	2
14	Sofa	7	Set	5	2	-
15	Proyektor + Attechment	2	Set	1	-	1

Sumber : Laporan Aset Tahun 2023



secara umum sarana dan prasarana yang tergambar pada table diatas mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Dinas Sosial Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan maupun perbaikan untuk menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas dan tidak lagi berfungsi secara optimal.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang melaksanakan 3 (tiga) urusan wajib pemerintah daerah yaitu; Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial; Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana; dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Dinas Sosial Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang telah melakukan hal-hal strategis, sebagai berikut :

1. Pemenuhan SPM Bidang Sosial;
2. Meningkatkan cakupan penanganan terhadap PPKS;
3. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak di Kota Padang Panjang;
4. Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk dan KB;
5. Meningkatkan upaya penurunan prevalensi stunting di Kota Padang Panjang;

Kinerja Dinas Sosial Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran dengan membandingkan antara target dengan realisasi pada Renstra Dinas Sosial Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2023. Untuk melihat pencapaian kinerja perangkat daerah dapat dilihat pada table 2.4. Sedangkan untuk anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada table 2.5 dibawah ini :



Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2019 - 2022

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-				Realisasi Capaian pada Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
A.	Urusan Sosial															
1.	Angka PPKS			%	6,54	6,48	6,15	5,85	6,54	6,48	19,61	5,43	100	100	318,9	92,82
2.	Persentase PPKS yang tertangani			%	75,01	36	55	60	75,01	82,81	79,72	69,82	100	230	144,9	116,4
3.	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif			%	100	90	90	90	100	90	90	90	100	100	100	100
4.	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Kelembagaan sosial yang aktif			%	75	75	100	100	75	75	75	75	100	100	75	75
5.	Persentase lansia terlanter yang tertangani			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6.	Persentase penyandang disabilitas terlanter yang tertangani			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7.	Persentase penanganan anak terlanter dan anak jalanan			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.	Persentase pelayanan penanganan gelandangan, pengemis, PSK dan korban penyalahgunaan NAPZA			%	40	45	100	100	40	45	100	100	100	100	100	100
9.	Persentase penurunan KK miskin			%	-	-	3	3,5	-	-	15,49	13,17	0	0	516,3	376,3
10.	Persentase korban bencana yang tertangani			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-				Realisasi Capaian pada Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
11.	Persentase taman makam pahlawan yang dipelihara			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
B.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak															
12.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			Indeks	65,24	66,62	80,3	81,7	65,24	66,62	66,62	69,44	100	100	82,96	84,99
13.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			Indeks	97,5	97,7	98,59	98,6	97,5	97,7	97,78		100	100	99,18	0
14.	Predikat APE				-	-	Pratama	Pratama	-	-	Pratama	Pratama	0	0	100	100
15.	Persentase ARG terhadap APBD			%	9	9,23	10	5	9	9,23	4,14	8,75	100	100	41,4	175
16.	Persentase organisasi perempuan aktif			%	68	76,9	100	100	68	76,9	100	100	100	100	100	100
17.	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan dari petugas terlatih			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
18.	Tingkat capaian Kota Layak Anak				Madya	Madya	Madya	Nindya	Madya	Madya	Madya	Nindya	100	100	100	100
19.	Persentase indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar			%	62		65	70	62		65,2	79,86	100	0	100,3	114,1
20.	Persentase forum anak yang aktif			%	5,26	15,79	36,84	47,4	5,26	15,79	36,84	47,4	100	100	100	100
21.	Persentase kasus anak korban kekerasan yang terselesaikan			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
C.	Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana															
22.	TFR (Total Fertility Rate)				2,51	2,51	2,48	2,46	2,51	2,51	2,4	2,54	100	100	96,77	103,3
23.	Rata-rata jumlah anak perkeluarga				2,45	2,7	2,3	2,25	2,45	2,7	2,6	2,4	100	100	113	106,7



NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-				Realisasi Capaian pada Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
24.	Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk				-	100	100	100	-	100	100	100	0	100	100	100
25.	Unmeet Need				-	-	11,75	22,8	-	-	27,95	25,42	0	0	237,9	111,5
26.	Prevalensi Stunting				19,5	17,03	15,5	16	19,5	17,03			100	100	0	0
27.	Persentase keluarga sasaran tribina yang ber KB				-	-	56,62	60,75	-	-	78,4	44,93	0	0	138,5	73,96
28.	Persentase kelompok PIK R yang aktif				80	65,52	86	73	80	65,52	71,43	100	100	100	83,06	137
29.	Persentase PUS keluarga sasaran BKB yang memperoleh pendampingan 1000 HP kelahiran				-	-	-	50	-	-	0	50,91	0	0	0	101,8
30.	Persentase kelompok PIK Remaja yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu				-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	100



Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2019-2022

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.728.457.500	1.723.065.000	-	-	1.628.616.351	1.365.182.634	-	-	94,2	79,2	-	-
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	69.000.000	72.600.000	-	-	68.920.000	72.483.550	-	-	99,9	99,8	-	-
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75.000.000	-	-	-	74.617.995	-	-	-	99,5	-	-	-
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	935.000	-	-	-	935.000	-	-	-	100,0	-	-	-
5.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	814.932.000	125.075.000	-	-	710.815.920	98.030.675	-	-	87,2	78,4	-	-



No	Program	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
6.	Program Peningkatan Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	274.895.000	-	-	-	253.625.811	-	-	-	92,3	-	-	-
7.	Program peningkatan partisipasi dan kelembagaan masyarakat	2.639.807.000	-	-	-	2.568.435.575	-	-	-	97,3	-	-	-
8.	Program Peningkatan Kelembagaan Masyarakat	-	918.650.015	-	-	-	852.895.112	-	-	-	92,8	-	-
9.	Program peningkatan pemberdayaan kelembagaan adat	624.800.000	-	-	-	584.882.092	-	-	-	93,6	-	-	-
10.	Program pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan sosial	972.445.000	983.627.010	-	-	866.509.860	866.860.576	-	-	89,1	88,1	-	-
11.	Program Pembinaan Anak Terlantar	30.775.000	-	-	-	27.587.878	-	-	-	89,6	-	-	-



No	Program	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
12.	Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial)	99.505.000	-	-	-	74.026.331	-	-	-	74,4	-	-	-
13.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	415.133.500	742.508.373	-	-	385.495.645	719.997.368	-	-	92,9	97,0	-	-
14.	Program Rehabilitasi Sosial Korban Bencana	150.000.000	-	-	-	100.176.563	-	-	-	66,8	-	-	-
15.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	448.414.000	259.569.450	-	-	421.721.693	249.647.501	-	-	94,0	96,2	-	-
16.	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	210.200.000	38.953.650	-	-	149.121.222	38.782.474	-	-	70,9	99,6	-	-
17.	Program Kekeragaman	341.525.000	-	-	-	313.766.573	-	-	-	91,9	-	-	-



No	Program	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
	Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan												
18.	Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	-	77.270.000	-	-	-	76.535.425	-	-	-	99,0	-	-
19.	Program Keluarga Berencana	2.704.687.000	-	-	-	2.095.308.405	-	-	-	77,5	-	-	-
20.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	308.120.000	-	-	-	285.198.007	-	-	-	92,6	-	-	-
21.	Program Pelayanan Kontrasepsi	62.500.000	-	-	-	49.370.762	-	-	-	79,0	-	-	-
22.	Program Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	183.986.000	-	-	-	172.593.575	-	-	-	93,8	-	-	-
23.	Program Peningkatan Pengendalian Penduduk	60.125.000	-	-	-	42.007.175	-	-	-	69,9	-	-	-
24.	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga	-	2.178.377.440	-	-	-	1.654.276.861	-	-	-	75,9	-	-



No	Program	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
	Berencana												
25.	Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	219.426.740	-	-	-	207.757.974	-	-	-	94,7	-	-
26.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	5.927.014.380	5.646.568.200	-	-	5.728.406.269	5.542.336.135	-	-	96,6	98,2
27.	Program Pemberdayaan Sosial	-	-	1.336.152.550	1.729.778.350	-	-	1.302.599.560	1.719.581.615	-	-	97,5	99,4
28.	Program Rehabilitasi Sosial	-	-	991.854.750	1.359.445.000	-	-	816.395.888	1.252.428.715	-	-	82,3	92,1
29.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	-	-	114.613.100	5.391.647.800	-	-	114.525.400	3.624.697.232	-	-	99,9	67,2
30.	Program Penanganan Bencana	-	-	211.436.200	172.388.000	-	-	160.035.819	168.535.268	-	-	75,7	97,8
31.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	-	-	47.383.000	21.250.000	-	-	43.146.530	20.846.775	-	-	91,1	98,1
32.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan	-	-	186.029.900	199.999.750	-	-	15.572.200	198.523.388	-	-	8,4	99,3



No	Program	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
	Perempuan												
33.	Program Perlindungan Perempuan	-	-	18.240.000	22.500.000	-	-	18.093.650	22.349.250	-	-	99,2	99,3
34.	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	-	-	176.014.000	207.829.650	-	-	174.630.318	205.691.647	-	-	99,2	99,0
35.	Program Perlindungan Khusus Anak	-	-	22.497.000	30.150.000	-	-	20.038.550	29.519.300	-	-	89,1	97,9
36.	Program Pengendalian Penduduk	-	-	905.516.250	135.464.500	-	-	901.928.750	120.960.348	-	-	99,6	89,3
37.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	-	-	955.801.000	1.074.614.200	-	-	611.253.243	864.653.842	-	-	64,0	80,5
38.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	-	-	167.977.700	1.398.058.650	-	-	163.027.850	1.302.754.482	-	-	97,1	93,2



Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dapat diuraikan sebagai berikut :

URUSAN SOSIAL

Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya, yang focus sasarannya diarahkan kepada pembangunan sumber daya manusia di Bidang Kesejahteraan Sosial yang sebaik-baiknya, serta penciptaan lingkungan social masyarakat yang sehat dan dinamis.

Sasaran pelayanan pembangunan bidang kesejahteraan social adalah individu, keluarga, kelompok atau komunitas masyarakat yang mengalami nasib kurang beruntung atau mengalami hambatan fisik maupun sosialnya yang disebut Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), serta masyarakat yang mampu melaksanakan upaya penanganan masalah kesejahteraan social yaitu mereka termasuk dalam kelompok Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Sejak terjadinya krisis ekonomi dan pandemic Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia serta dampak dari berbagai kebijakan pemerintah dibidang ekonomi telah menunjukkan kecenderungan adanya peningkatan jumlah populasi PPKS.

Jumlah PPKS hasil validasi data Kota Padang Panjang yang dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 2017 hingga 2021 terlihat jelas peningkatan populasi PPKS di Kota Padang Panjang dengan rincian berdasarkan Peraturan Menteri Sosial yang terbaru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, sebagai berikut :

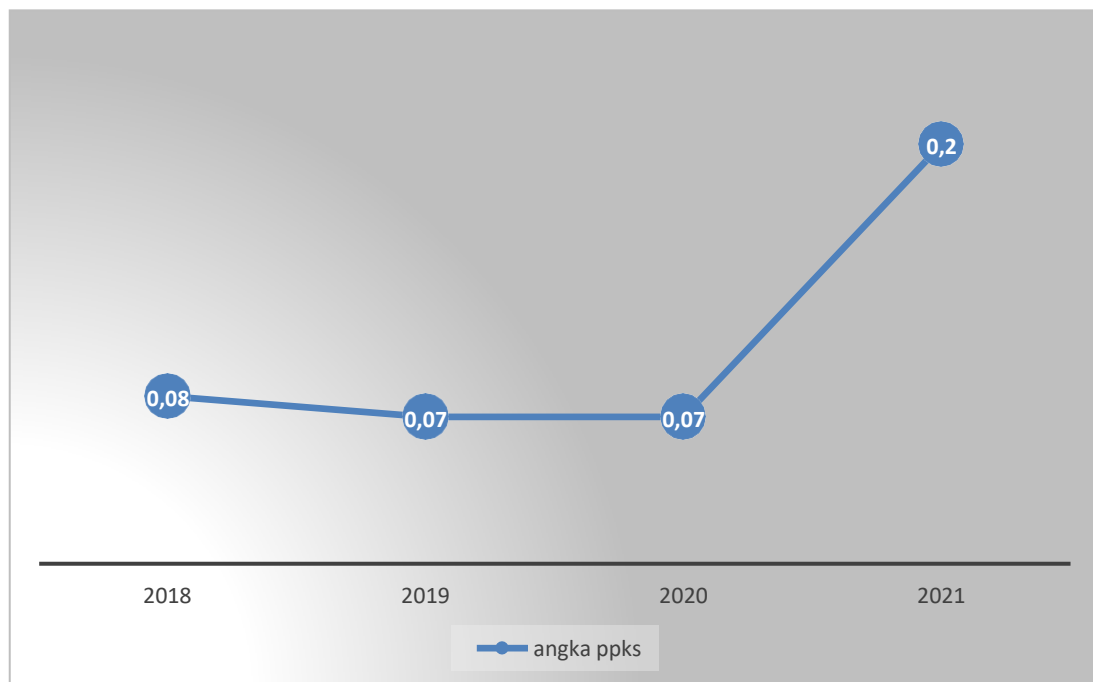


Tabel 2.6
Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Di Kota Padang Panjang Tahun 2017-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Anak balita terlanter	Anak	0	0	1	0	0	0
2	Anak terlanter	Anak	15	26	19	16	16	13
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	Anak	0	0	6	7	2	0
4	Anak jalanan	Anak	0	0	0	0	0	0
5	Anak dengan kedisabilitasn	Anak	63	79	51	85	91	98
6	Anak korban tindak kekerasan	Anak	0	0	0	0	0	0
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	Anak	0	0	0	0	0	0
8	Lanjut usia terlanter	Orang	339	318	266	280	324	352
9	Penyandang disabilitas	Orang	206	255	211	254	259	310
10	Tuna Sosial	Orang	0	0	0	0	0	0
11	Gelandangan	Orang	0	1	0	1	1	0
12	Pengemis	Orang	4	5	3	3	2	2
13	Pemulung	Orang	3	5	1	4	5	8
14	Kelompok minoritas	Orang	0	0	0	0	0	0
15	Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan (BWBLP)	Orang	0	3	0	3	3	0
16	Orang dengan HIV/AIDS	Orang	0	0	0	0	0	0
17	Korban penyalahgunaan NAPZA	Orang	5	3	13	7	6	3
18	Korban Trafficking	Orang	0	0	0	0	0	0
19	Korban tindak kekerasan	Orang	0	0	0	0	0	0
20	Pekerja migran bermasalah sosial	Orang	0	0	0	0	0	0
21	Korban bencana alam	Orang	0	0	0	0	0	0
22	Korban bencana sosial	Orang	0	0	0	0	0	0
23	Perempuan rawan sosial ekonomi	Orang	295	279	259	272	256	278
24	Fakir miskin	KK	0	3414	2985	2907	10204	2219
25	Keluarga bermasalah sosial psikologi	KK	5	4	3	7	2	2
26	Komunitas adat terpencil	KK	0	0	0	0	0	0
JUMLAH			935	4.392	3.818	3.846	11.171	3.285

Sumber data : Buku PPKS Kota Padang Panjang Tahun 2017-2022

Gambar 2.2
Angka PPKS Kota Padang Panjang Tahun 2018-2021



Sumber : Laporan Kinerja Dinas Sosial PPKB PPPA Tahun 2018-2021

Data jumlah potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) hasil validasi data tahun 2022 terdapat perubahan, hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi atau kepedulian masyarakat terhadap masalah kesejahteraan sosial menunjukkan perubahan.

Tabel 2.7
Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Di Kota Padang Panjang Tahun 2019-2022

No	Jenis PSKS	Satuan	Jumlah			
1.	Pekerja Sosial Profesional	Orang	1	1	1	1
2.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Orang	92	92	92	92
3.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Orang	25	25	25	25
4.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Orang	2	2	2	2
5.	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Orang	5	5	5	5
6.	Karang Taruna	Lembaga	19	19	19	19
7.	Dunia Usaha	Lembaga	3	4	4	4
Jumlah			147	148	148	148

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Sosial PPKB PPPA Tahun 2019-2022

Pelaksanaan penganan PPKS di fokuskan kepada Rehabilitasi Sosial. Rehabilitasi social merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Keberfungsian social merupakan suatu kondisi yang memungkinkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya serta mengatasi masalah dalam kehidupannya.

Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi PPKS di Kota Padang Panjang dilaksanakan dalam bentuk dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan social dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial dan terapi mental spiritual, pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi social, dan/atau dukungan aksesibilitas.

Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial yang dilakukan di Kota Padang Panjang difokuskan kepada 5 kluster yaitu penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, tuna social khususnya gelandangan dan pengemis dan korban bencana. Upaya rehabilitasi social bagi ke lima kluster diatas terus diupayakan dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Capaian kinerja selama tahun 2020 s/d 2022 dapat dilihat pada table berikut.

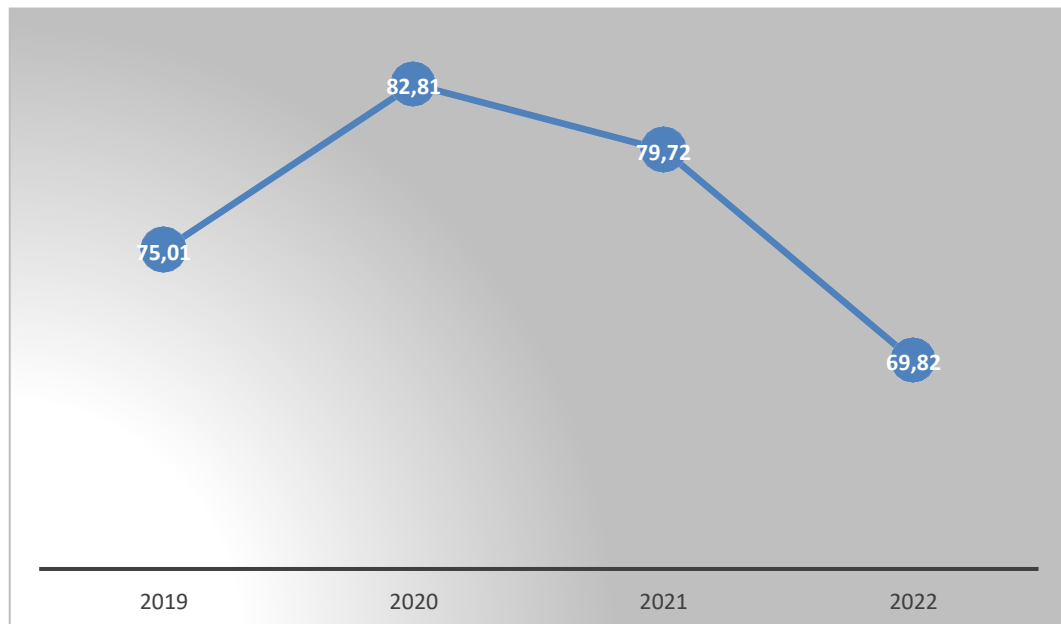
Tabel 2.8
Pencapaian SPM Bidang Sosial
Tahun 2020-2022

No	Indikator kinerja	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	13.78	40.34	98.53
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	6.25	80	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	32.14	54.19	99.37
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	0	80	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100	90	100

Sumber : Realisasi SPM Urusan Sosial 2020-2022

Secara keseluruhan, PPKS yang tertangani selama kurun waktu 2019-2022 masih belum menyentuh angka 100%. Hal ini tidak terlepas dari jumlah PPKS yang terus meningkat setiap tahun, terutama pada tahun 2022 jumlah PPKS meningkat tajam sebagai imbas dari pandemic Covid-19 dimana banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan sehingga menambah jumlah penduduk miskin di Kota Padang Panjang. Penanganan PPKS tidak hanya dilakukan melalui pemberian BLT melalui APBD ataupun APBN. Namun juga mengoptimalkan potensi kesejahteraan social untuk turut serta berpartisipasi dalam pengentasan masalah kesejahteraan social di Kota Padang Panjang seperti dunia usaha dan Lembaga masyarakat yang ada di Kota Padang Panjang.

Gambar 2.3
Jumlah PPKS yang Tertangani Tahun 2019-2022



Sumber : Laporan Kinerja Dinas Sosial PPKB PPPA Tahun 2019-2022

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Kesenjangan dan Keadilan Gender

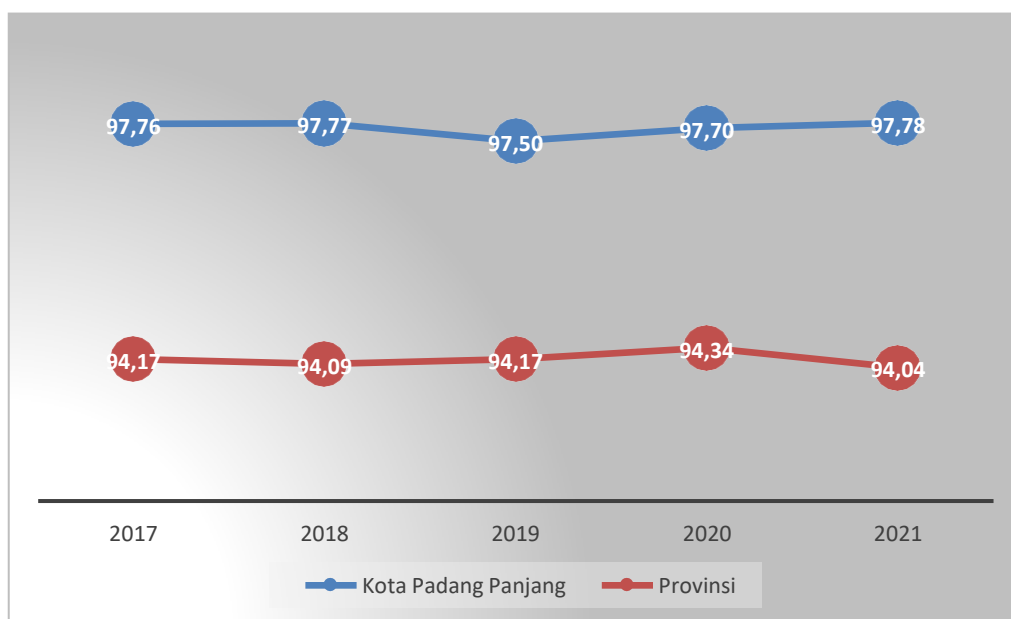
Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan



angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.

IPG Kota Padang Panjang menunjukkan lebih tinggi, dibandingkan capaian nasional dan provinsi. Dari angka penyesuaian IPG di bawah ini dapat dilihat angka IPG Kota Padang Panjang dari waktu ke waktu :

Gambar 2.4
Grafik Persandingan capaian IPG Kota Padang Panjang dengan IPG Provinsi

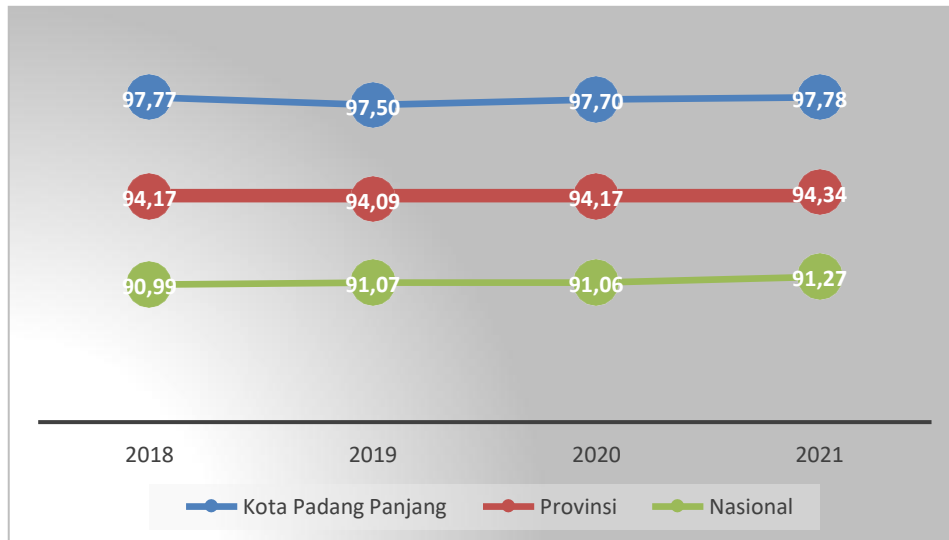


Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2022.

Dilihat capaian IPG Kota Padang Panjang menunjukkan terdapat penurunan pada tahun 2019 dan Kembali naik pada tahun 2020 dan 2021. Namun secara keseluruhan dapat dilihat IPG Kota Padang Panjang masih berada diatas angka Nasional dan Provinsi. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.5

Grafik Persandingan capaian IPG Kota Padang Panjang dengan IPG Provinsi dan IPG Nasional

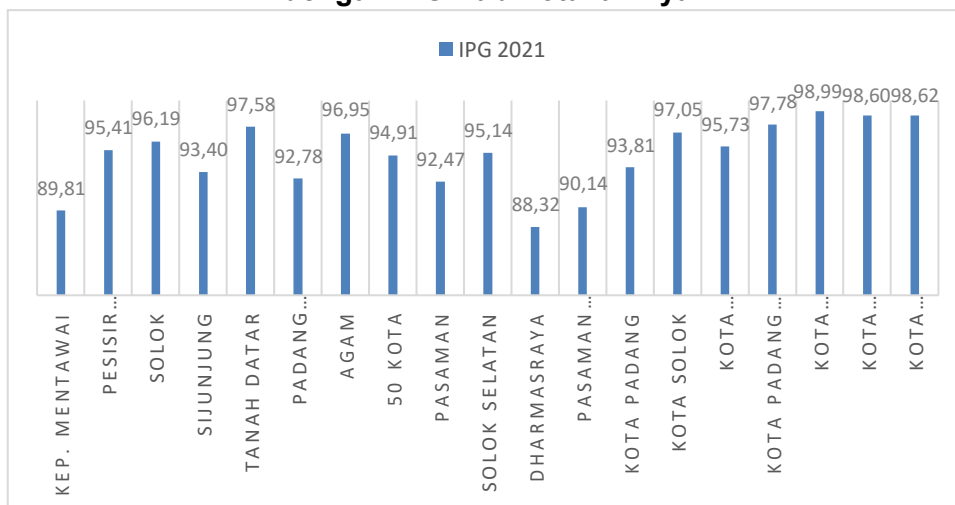


Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2022.

Jika diperbandingkan dengan Kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat, menunjukkan capaian Kota Padang Panjang cukup bagus, berada di posisi 4 besar dibawah Kota Bukittinggi, Pariaman dan Payakumbuh. Selengkapnya dapat disimak pada gambar berikut :

Gambar 2.6

Grafik Persandingan capaian IPG Kota Padang Panjang dengan IPG Kab/Kota lainnya

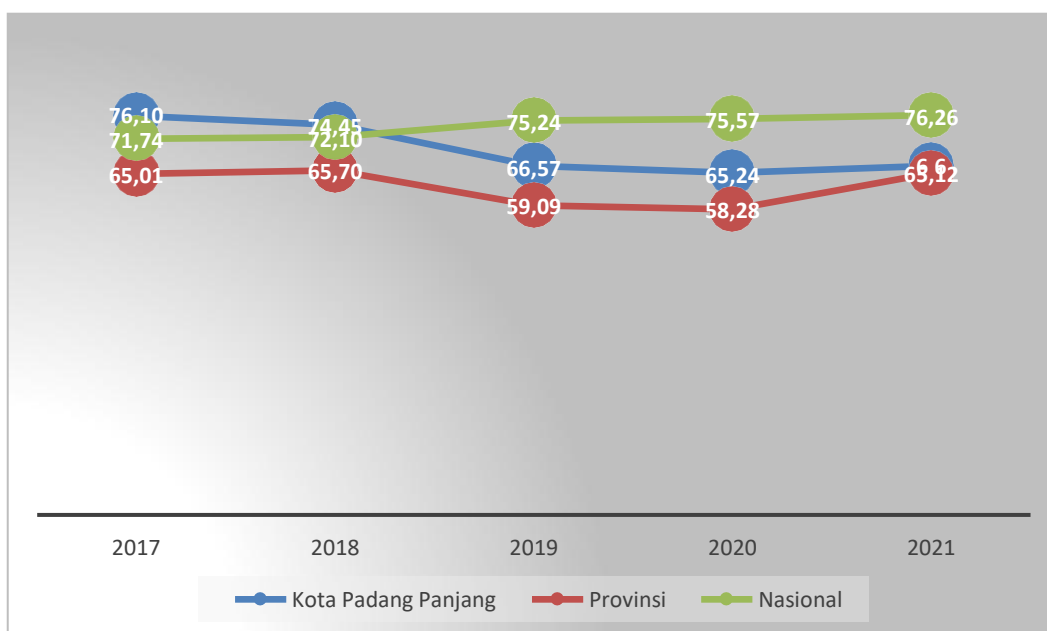


Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2022.

Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2018, 2019 dan terus menurun hingga 2020, IDG Kota Padang Panjang masih berada diatas IDG Provinsi. Penurunan IDG Kota Padang Panjang disebabkan oleh beberapa factor, diantaranya adalah menurunnya keterlibatan perempuan di parlemen dari angka 20% turun menjadi 10%, menurunnya persentase perempuan sebagai tenaga profesional, dari angka 65,03% pada tahun 2018, turun menjadi 61,96% di tahun 2019. Angka ini cenderung fluktuatif, meskipun mengalami peningkatan pada tahun 2020, namun kembali turun pada tahun 2021. Selengkapnya dapat disimak pada grafik berikut :

Gambar 2.7
IDG Kota Padang Panjang 2017-2021



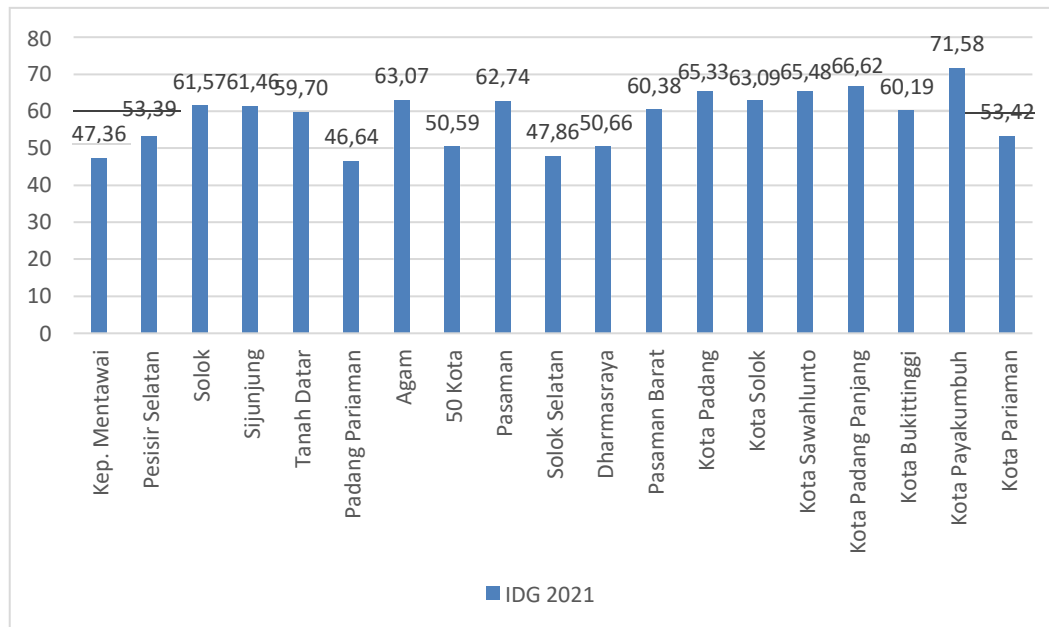
Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2018 - 2022.

Jika diperbandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, maka dapat dilihat posisi Kota Padang Panjang berada diatas rata-rata kabupaten/kota dan

provinsi. IDG Kota Padang Panjang berada pada urutan ke dua setelah kota Payakumbuh.

Gambar 2.8

IDG Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021



Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2022.

2. Perlindungan Hak Perempuan

Perlindungan terhadap perempuan merupakan upaya untuk melindungi hak asasi perempuan, terutama untuk memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Ruang lingkup kegiatan perlindungan perempuan mencakup perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, perlindungan perempuan dari masalah sosial (meliputi lanjut usia, penyandang disabilitas, konflik sosial dan bencana), perlindungan pekerja perempuan di dalam dan luar negeri, serta perlindungan perempuan dari tindak pidana perdagangan orang.

Kebijakan perlindungan perempuan difokuskan pada tiga permasalahan utama, yaitu : pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan bagi perempuan korban kekerasan. Sedangkan prinsip-prinsip yang harus selalu diterapkan dalam pelaksanaan pemenuhan hak asasi perempuan adalah :

- 1). Non-Diskriminasi : yaitu prinsip pemenuhan hak perempuan yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, agama, paham politik, asal kebangsaan, suku, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.
- 2). Penghargaan terhadap pendapat/suara perempuan; yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap perempuan yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Capaian perlindungan hak perempuan meliputi ditetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, dibentuk dan difungsikannya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Pembentukan Tim Penanganan Kasus dan relawan perlindungan perempuan dan anak yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dari masing-masing kelurahan se Kota Padang Panjang.

Dalam upaya peningkatan peran aparat dan masyarakat dalam perlindungan perempuan, Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus melakukan peningkatan pemahaman, pengetahuan, kesadaran masyarakat dan aparat melalui sosialisasi, advokasi dan koordinasi di daerah. Selain itu juga dilakukan peningkatan kemampuan dan kapasitas pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penyelenggaraan pelatihan pendampingan dengan sasaran petugas, aparat dan LSM Peduli Perempuan dan Anak, meningkatkan penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik.

3. Perlindungan Anak

Kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak difokuskan pada tiga hal yaitu pencegahan, pelayanan dan penanganan masalah yang dihadapi anak. Prinsip-prinsip yang harus selalu diterapkan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak adalah :



- a. Non-Diskriminasi; yaitu prinsip pemenuhan hak anak yang tidak membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.
- b. Kepentingan terbaik untuk anak, yaitu mengupayakan semua keputusan, kegiatan dan dukungan dari para pihak yang berpengaruh semata-mata untuk kepentingan terbaik anak;
- c. Mengutamakan hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang yaitu kegiatan yang disusun untuk meningkatkan perkembangan anak berdasarkan kemampuan dan sifat perkembangannya;
- d. Menghormati pandangan anak, yaitu memperhatikan dan memasukkan pandangan dan kebutuhan anak dalam setiap proses pembahasan dan pengambilan keputusan setiap kegiatan.

Dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak, capaian ditandai dengan terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta meningkatnya perlindungan anak dari tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi dan perlakuan salah lainnya.

Perlindungan anak dikuatkan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan turunannya Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 82 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Di bidang partisipasi anak, telah dibentuknya Forum Anak Daerah Kota Padang Panjang, dua organisasi Forum Anak Kecamatan dan enam belas Forum Anak Kelurahan. Untuk meningkatkan peran forum anak dalam perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kota Padang Panjang terus meningkatkan kapasitas Forum Anak Daerah, kecamatan maupun kelurahan melalui Capacity Building, sosialisasi maupun pelatihan.

4. Tumbuh Kembang Anak

Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak tidak hanya dilihat dari aspek fisik, namun juga non fisik seperti mewujudkan lingkungan yang layak bagi anak. Kota Padang Panjang telah menginisiasi KLA dan deklarasi KLA pada tahun 2006. Upaya pengembangan Kota Layak Anak terus dilakukan melalui peningkatan peran semua pihak, peningkatan peran media massa dan partisipasi dunia usaha melalui



APSAI, penyusunan RAD KLA yang terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah, penyediaan anggaran untuk penyusunan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak, serta peningkatan kapasitas Gugus Tugas KLA melalui advokasi, sosialisasi dan pelatihan pengembangan KLA.

Upaya pemenuhan hak anak di bidang pendidikan telah dilakukan dengan mengembangkan Sekolah Ramah Anak. Di Kota Padang Panjang telah dikembangkan Sekolah Ramah Anak pada empat tingkatan yaitu 58 SRA di tingkat Pra Sekolah, 38 SRA di tingkat SD/Sederajat, 14 SRA di tingkat SMP/Sederajat dan 5 SRA di tingkat SMA/Sederajat.

Upaya pemenuhan hak anak di bidang kesehatan telah dilakukan dengan mengembangkan Puskesmas dan Rumah Sakit Ramah Anak. Di Kota Padang Panjang telah dikembangkan 4 (empat) Puskesmas Ramah Anak dan 1 (satu) Rumah Sakit Ramah Anak.

5. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Padang Panjang selalu diupayakan peningkatannya dari waktu ke waktu. Diantaranya adalah melalui advokasi, sosialisasi dan pelatihan tentang perlindungan perempuan dan anak bagi 100 orang relawan kelurahan yang berada di bawah naungan PATBM.

URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. Meskipun termasuk kategori kota kecil, LPP Kota Padang Panjang menurut proyeksi data BPS Kota Padang Panjang tahun 2010-2020 terbilang tinggi yaitu 1,76. Lebih tinggi dari LPP Provinsi 1,29.



Tabel 2.9
Perbandingan Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Kota Padang Panjang
dengan kota lain di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2000, 2010 dan 2020

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Ribu)			LPP per Tahun	
		2000	2010	2020	2000-2010	2010-2020
1.	Padang	713.242	836.671	909.040	1.57	0.84
2.	Solok	48.120	59.631	73.438	2.13	2.07
3.	Sawahlunto	50.868	57.086	65.138	1.11	1.32
4.	Padang Panjang	40.139	47.198	56.311	1.59	1.76
5.	Bukittinggi	91.983	111.725	121.028	1.92	0.81
6.	Payakumbuh	97.901	117.320	139.576	1.78	1.74
7.	Pariaman	NA	79.311	94.224	1.35	1.71

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka 2023

Pertumbuhan penduduk yang tinggi sebenarnya membawa beberapa keuntungan, diantaranya adalah ketersediaan tenaga kerja yang melimpah. Namun, jika pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak dibarengi oleh kebijakan pemerintah yang baik dalam menghadapi masalah ini, maka pertumbuhan penduduk yang tinggi hanya akan membawa dampak yang buruk bagi suatu daerah. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari pertumbuhan penduduk yang tinggi adalah: dari segi sosial ekonomi, pendidikan dan kesehatan, lingkungan hidup.

Permasalahan diatas dapat disikapi dengan peningkatan pelaksanaan perencanaan pembangun berbasis kependudukan agar pembangunan berwawasan kependudukan dapat terwujud.

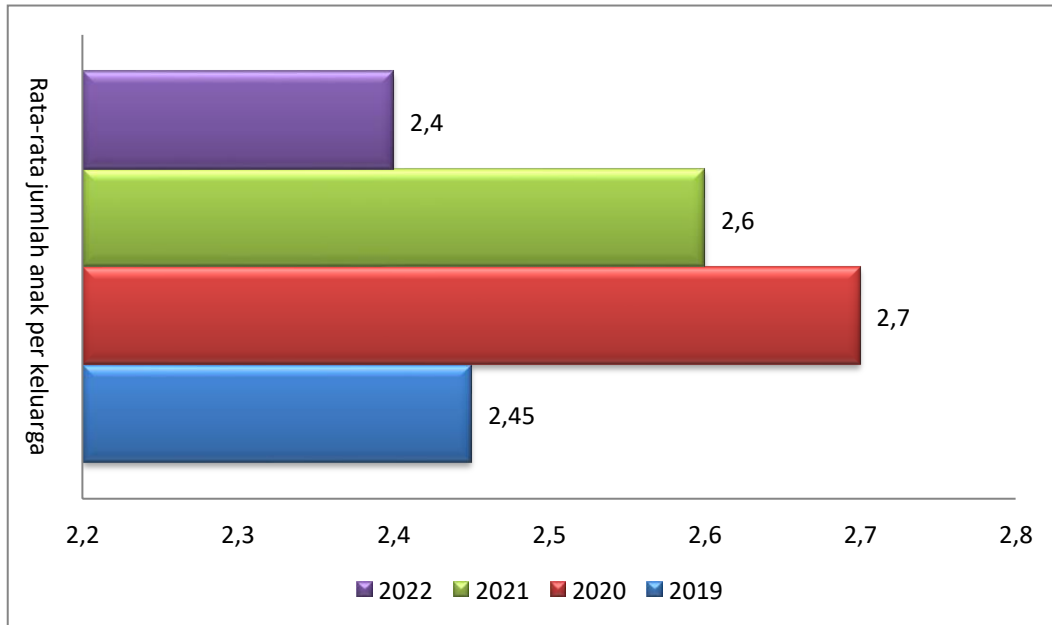
2. Rata-rata jumlah anak per keluarga

Salah satu indikator keberhasilan Keluarga Berencana adalah penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga. Ledakan penduduk dapat dicegah tidak hanya melalui program KB namun juga yang lebih penting adalah kesadaran penduduk untuk ber-KB. Program KB 2 anak lebih baik akan tercapai jika kesadaran masyarakat untuk ber-KB rendah.



Gambar 2.9

Rata-rata jumlah anak per keluarga Kota Padang Panjang Tahun 2019-2022



Sumber : Laporan Kinerja Dinas Sosial PPKB PPPA.

Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Padang Panjang telah mengalami penurunan tiap tahunnya. Namun masih berada pada angka diatas 2 poin. Jika program KB menargetkan 2 anak lebih baik, tentu saja rata-rata jumlah anak perkeluarga 2,4 anak masih perlu diturunkan. Hal ini dapat disikapi dengan mengoptimalkan pelaksanaan program KB. Tidak hanya melalui pelayanan KB gratis pada momen-momen strategis namun juga melalui peningkatan kompetensi Kader dan PLKB yang merupakan ujung tombak pelaksana program KB di lini lapangan.

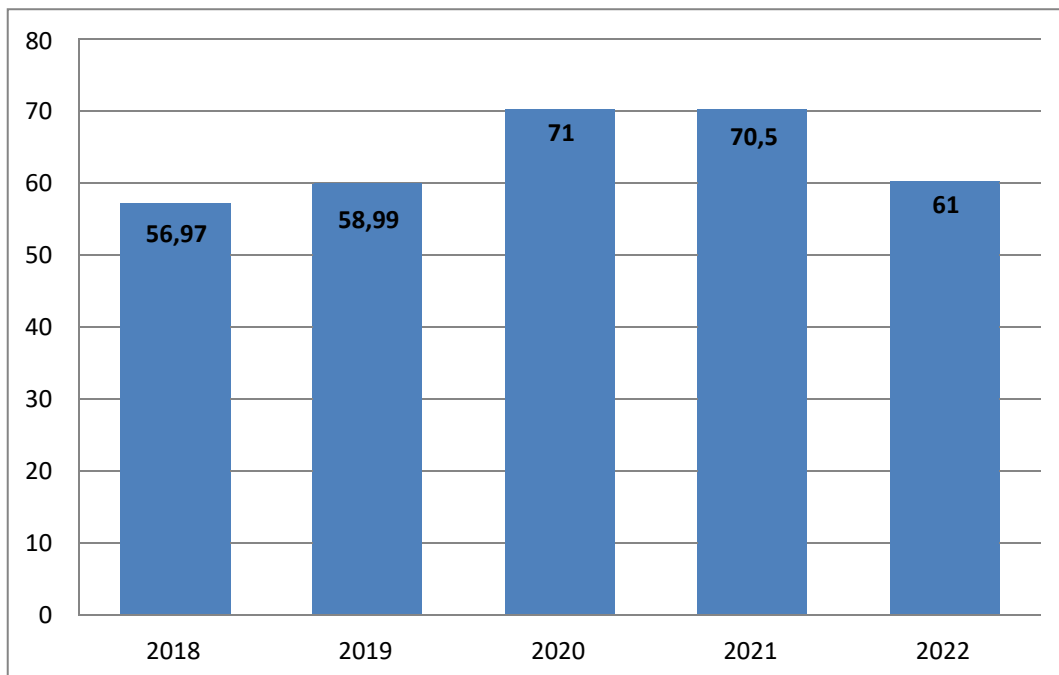
3. Rasio Akseptor KB

Salah satu cara untuk menekan laju pertumbuhan penduduk adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (Akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.



Gambar 2.10

Rasio Akseptor KB Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022



Sumber : Dallap BKKBN

4. Prevalensi Stunting

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang sering terjadi pada anak akibat kurangnya asupan nutrisi atau pola makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting adalah hasil jangka Panjang dari kekurangan nutrisi dengan tinggi badan menurut umur kurang dari -2 Standar Deviasi (SD). Stunting merupakan salah satu masalah gizi di dunia dan stunting perlu mendapatkan perhatian khusus karena dapat meningkatkan mortalitas dan morbiditas serta menghambat perkembangan fisik dan mental anak.

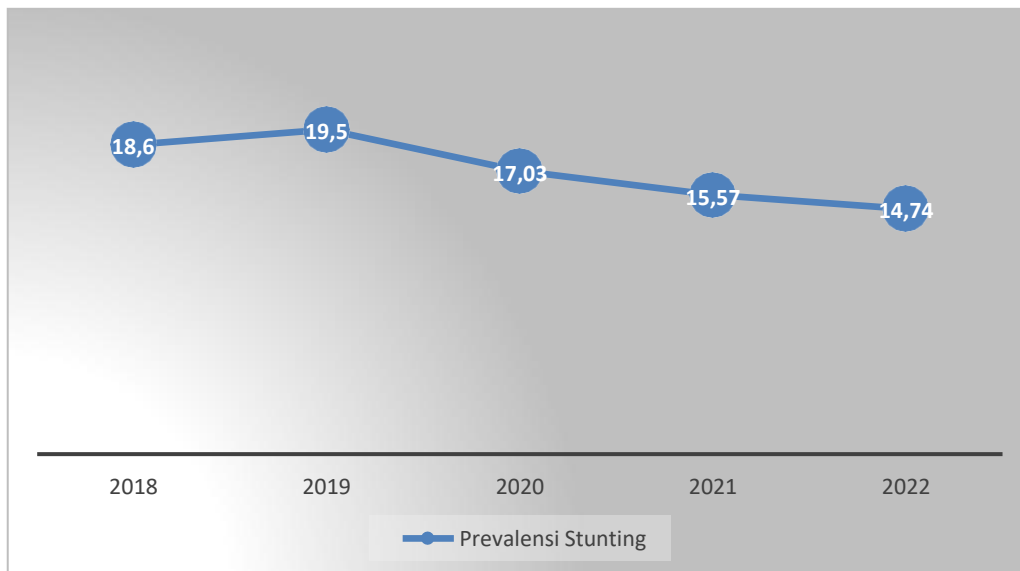
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting menyatakan bahwa mulai tahun 2022 selain tugas utama meningkatkan implementasi program pembangunan keluarga, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (Bangga Kencana), Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, mendapatkan mandate yang sangat strategis untuk berkontribusi terhadap upaya percepatan penurunan stunting.



Kondisi stunting di Kota Padang Panjang pada 4 (empat) tahun terakhir cukup fluktuatif. Namun demikian, upaya-upaya untuk penurunan stunting masih terus dilakukan untuk mencapai target Nasional pada tahun 2024 yaitu 14%. Data prevalensi stunting Kota Padang Panjang tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 2.11

Prevalensi Stunting Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022



Sumber : Laporan Status Gizi Balita DKK Padang Panjang

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang pada tiga tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Lemahnya koordinasi antar lintas terkait dalam pembangunan usaha kesejahteraan sosial.
2. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
3. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
4. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.



5. Keterwakilan perempuan dalam legislative masih dibawah 20%.
6. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
7. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
8. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
9. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
10. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan KB yang bermutu.
11. Adanya faktor budaya, masih tingginya kebutuhan memiliki anak perempuan sebagai penerus keluarga (matriakat) di tengah-tengah masyarakat sehingga program 2 anak cukup belum terwujud.

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya potensi lembaga kesejahteraan sosial dalam mendukung peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial dalam rangka penanganan PPKS di daerah.
2. Tingginya Komitmen pemerintah pusat dan provinsi dalam pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
4. Terbukanya peluang kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
5. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan



internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dalam peningkatan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).

6. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
7. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
8. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
9. Mudahnnya masyarakat memperoleh informasi tentang KB.
10. Adanya dukungan dana alokasi khusus (DAK) di bidang KB setiap tahun dari pusat.
11. Tingginya tingkat kepedulian masyarakat, tokoh masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan terhadap pelayanan/pemenuhan gizi balita dilihat dari banyaknya bantuan makanan tambahan balita sebagai upaya penanggulangan stunting di Kota Padang Panjang.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

URUSAN SOSIAL

1. Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS meliputi 1) Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); 2) Data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial; dan 3) Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) termasuk didalamnya data lembaga dibidang kesejahteraan social seperti LKS, panti dan balai kesejahteraan social. DTKS digunakan sebagai sumber data utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan social agar dapat dilakukan secara terpadu, tepat sasaran dan berkelanjutan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah/atau masyarakat. Data ini bertujuan sebagai database calon penerima program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.

Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas DTKS sebagai basis data calon penerima program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan social, masih ditemui kendala sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan data Berdasarkan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dimana Data Terpadu harus diverifikasi dan divalidasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) tahun sekali yang dimonitor oleh kementerian Sosial RI melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Untuk itu sangat perlu dilakukan adjustment sumberdaya TI, perangkat hardware dan software yang menyesuaikan dengan kebutuhan aplikasi.



b. Kurangnya kapasitas SDM pengelola data

Masih terbatasnya SDM pengelola data baik pada Dinas Sosial PPKB PPPA Kota Padang Panjang maupun SDM petugas verifikasi dan validasi data dilapangan yaitu PSM. Sehubungan dengan terjadinya transformasi digital pada pengelolaan DTKS, maka perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM pengelola data di daerah.

2. Belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan sosial

Kelembagaan Sosial atau potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. PSKS yang aktif di Kota Padang Panjang saat ini adalah :

- a. Pekerja Sosial Profesional (1 orang).
- b. Pekerja Sosial Masyarakat/PSM (92 orang)
- c. Taruna Siaga Bencana/TAGANA (28 orang)
- d. Karang Taruna (19 kelompok)
- e. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga/LK3 (1 lembaga)
- f. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan/TKSK (2 orang)

Lembaga diatas aktif berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Padang Panjang, namun dalam pelaksanaan perannya masih ada hambatan yang dihadapi yaitu sebagai berikut :

a. Biaya operasional PSKS kurang memadai.

Lembaga LK3 Raudhah dengan 5 orang pengurus, aktif memberikan konseling dan konsultasi kesejahteraan keluarga bagi keluarga yang bermasalah. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi home visite, konseling langsung maupun melalui siaran radio dan trauma healing. Jumlah keluarga yang membutuhkan pendampingan psikososial terus meningkat tiap tahun. Pada tahun 2022 tercatat LK3 Raudhah telah menangani sebanyak 43 (empat puluh tiga) pengaduan yang masuk.

b. Sarana dan prasarana Lembaga yang kurang memadai.

LK3 dan Karang Taruna Kota Padang Panjang bersekretariat di Kantor Dinas Sosial PPKB PPPA Kota Padang Panjang, hingga saat ini LK3 dan Karang Taruna masih memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada pada bidang PSPFM.

c. Belum optimalnya kemampuan SDM PSKS dalam penguatan Lembaga sosial.



Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, dibutuhkan adanya peningkatan kapasitas SDM pengelola Lembaga.

3. Belum optimalnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kinerja urusan sosial Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang diukur dari keberhasilan dalam mengentaskan jumlah PPKS dan Peningkatan Pemberian jaminan sosial kepada sasaran penerima jaminan sosial. Meskipun perhatian Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sudah cukup tinggi dalam penanganan PPKS melalui pemberian jaminan sosial maupun pemenuhan kebutuhan dasar, masih ditemui permasalahan-permasalahan yang cukup serius dalam penanganan PPKS di Padang Panjang seperti hal-hal berikut :

- a. Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang penanganan PPKS.

Untuk saat ini, sarana dan prasarana penunjang yang tersedia sudah dalam kondisi yang kurang baik diantaranya yaitu :

- 1) Personil yang ada pada bidang PPRS sebanyak 7 (tujuh) orang, sementara sarana computer penunjang administrasi hanya tersedia 2 (dua) unit dan berada dalam kondisi rusak ringan.
 - 2) Kendaraan rescue tagana dan Dapur Umum (DU) dalam kondisi rusak berat.
- b. Belum adanya SDM pendukung dalam kegiatan penanganan PPKS.
- c. Belum adanya SOP penanganan PPKS.
- d. Belum adanya wadah/katup penyelamat bagi PPKS yang sudah direhabilitasi.
- e. Kurangnya integrasi dan koordinasi dengan OPD terkait dalam penanganan PPKS.
- f. Kurangnya pemberdayaan PPKS
- g. Belum tersedianya layanan rehabilitasi sosial berkelanjutan di daerah.

Untuk pelayanan rehabilitasi sosial, Kota Padang Panjang masih memanfaatkan panti dibawah pengelolaan provinsi dan pusat yang terdapat di

Kota Padang dan Jambi. Hal ini menjadi kendala karena panti ini dimanfaatkan oleh beberapa kabupaten Kota di Sumatera sehingga kapasitas panti cukup terbatas.

4. Kontinuitas penanganan bencana.

Sepanjang tahun 2022, telah dilayani 296 keluarga yang membutuhkan bantuan



pasca bencana berupa 296 bantuan permakanan, 88 bantuan sandang dan 282 pelayanan dukungan psikososial. Bencana yang dialami berupa bencana banjir dan kebakaran. Dalam pelayanan korban pasca bencana masih dihadapi kendala sebagai berikut :

a. Masih kurangnya personil Tagana.

Pada tahun 2022 tercatat 28 orang personil Tagana Kota Padang Panjang, namun yang aktif sebanyak 25 orang. Mengingat kondisi Kota Padang Panjang yang rawan terjadi bencana sangat dibutuhkan penambahan personil Tagana.

b. Kurangnya pelatihan bagi personil Tagana.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas, personil Tagana perlu dilatih dan memiliki kemampuan dasar tanggap bencana, untuk itu sangat dibutuhkan pelaksanaan Diklat Dasar Tagana bagi personil Tagana Padang Panjang.

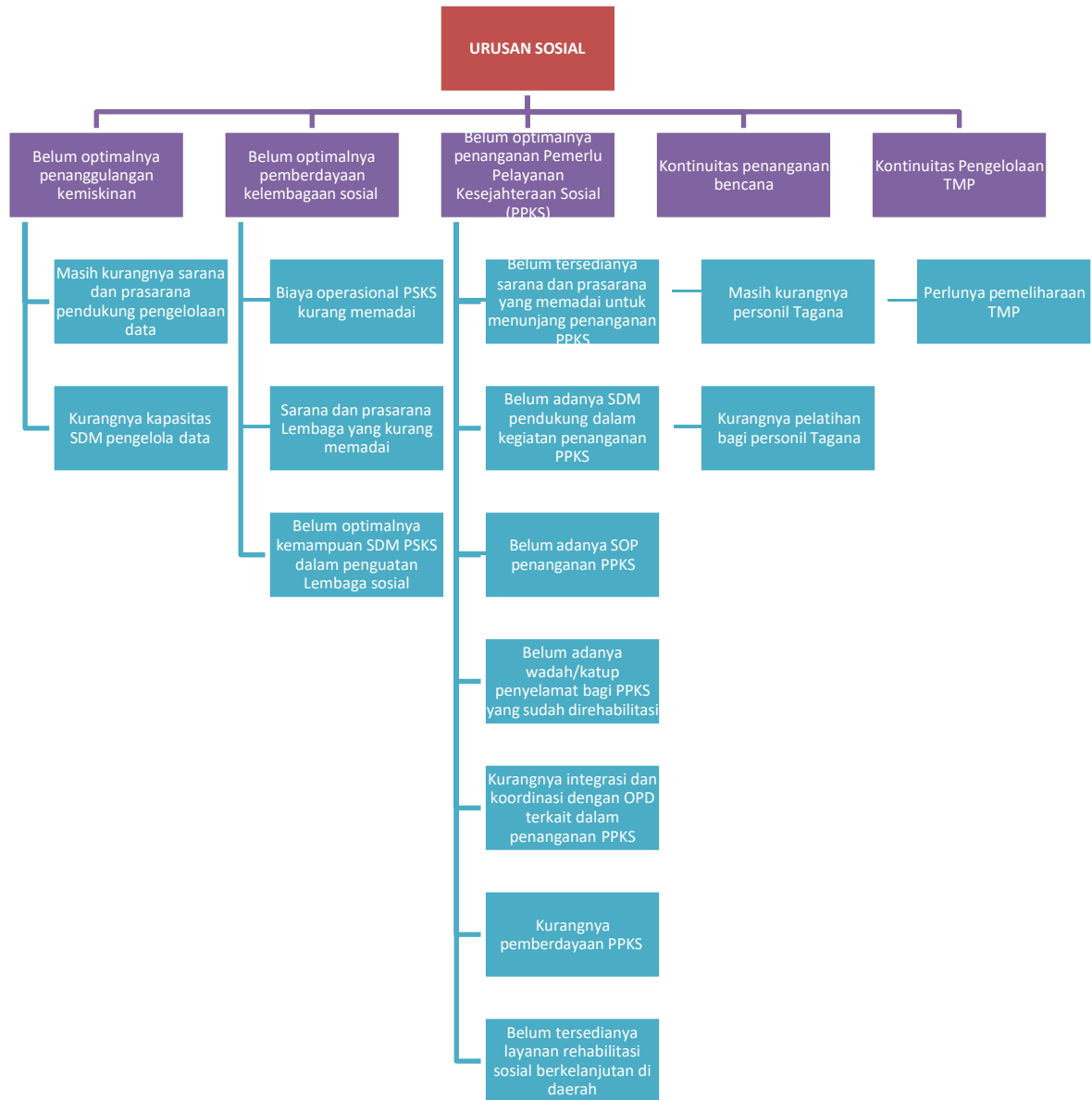
5. Kontinuitas Pengelolaan TMP

Perlunya pemeliharaan TMP

Kota Padang Panjang memiliki 1 (satu) unit Taman Makam Pahlawan yang berlokasi di kecamatan Padang Panjang Barat yaitu Taman Makam Pahlawan Kusuma Sakti. Kondisi TMP saat ini cukup memprihatinkan dan sangat membutuhkan rehab sedang untuk bagian rumah persemayaman dan gonjong gerbang makam.



Gambar 3.1
Pohon Masalah Urusan Sosial



URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

1. Belum optimalnya penyelenggaraan upaya pengendalian penduduk.

Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam saja, kualitas penduduk juga merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan. Capaian pembangunan ditentukan oleh pembangunan kependudukan, ekonomi, budaya dan karakter bangsa. 3 aspek keberhasilan program Pengendalian Penduduk KB adalah (1) Pengendalian kuantitas penduduk (2) Peningkatan kualitas penduduk (3) Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Meskipun kinerja urusan pengendalian penduduk keluarga berencana secara umum sudah berhasil namun demikian masih tetap saja dijumpai beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian dari Pemerintah Daerah di masa mendatang. Permasalahan tersebut antara lain :

a. Laju pertumbuhan penduduk masih tinggi.

LPP Kota Padang Panjang menurut proyeksi data BPS Kota Padang Panjang tahun 2010-2020 terbilang tinggi yaitu 1,76. Lebih tinggi dari LPP Provinsi 1,29. Laju pertumbuhan tinggi memberikan tantangan yang cukup tinggi pula bagi daerah. Jika pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak dibarengi dengan kebijakan pemerintah yang baik maka akan membawa dampak buruk bagi daerah dari segi sosial ekonomi, Pendidikan, Kesehatan dan lingkungan hidup.

b. Belum maksimalnya pemanfaatan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 aspek oleh OPD dalam penyusunan program kegiatan.

c. Kurangnya dukungan OPD terkait dalam program kampung keluarga berkualitas.

d. Belum tersedianya sarana prasarana rumah dataku di kampung keluarga berkualitas.

2. Masih tingginya *Unmet need*

Yaitu kondisi dimana keinginan pasangan usia subur (PUS) terhadap suatu jenis alat kontrasepsi yang tidak tersedia sehingga mereka mengambil keputusan untuk tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi. Unmet need tinggi disebabkan oleh :

a. Masih kurangnya pemahaman PUS tentang KB. Dilihat dari masih adanya PUS yang takut efek samping, adanya larangan suami dan alasan lainnya.

b. Masih rendahnya capaian CPR (Contraceptive Prevalence Rate).

c. Masih kurangnya kesertaan KB MKJP (Jenis MOP, MOW, IUD dan Implant).

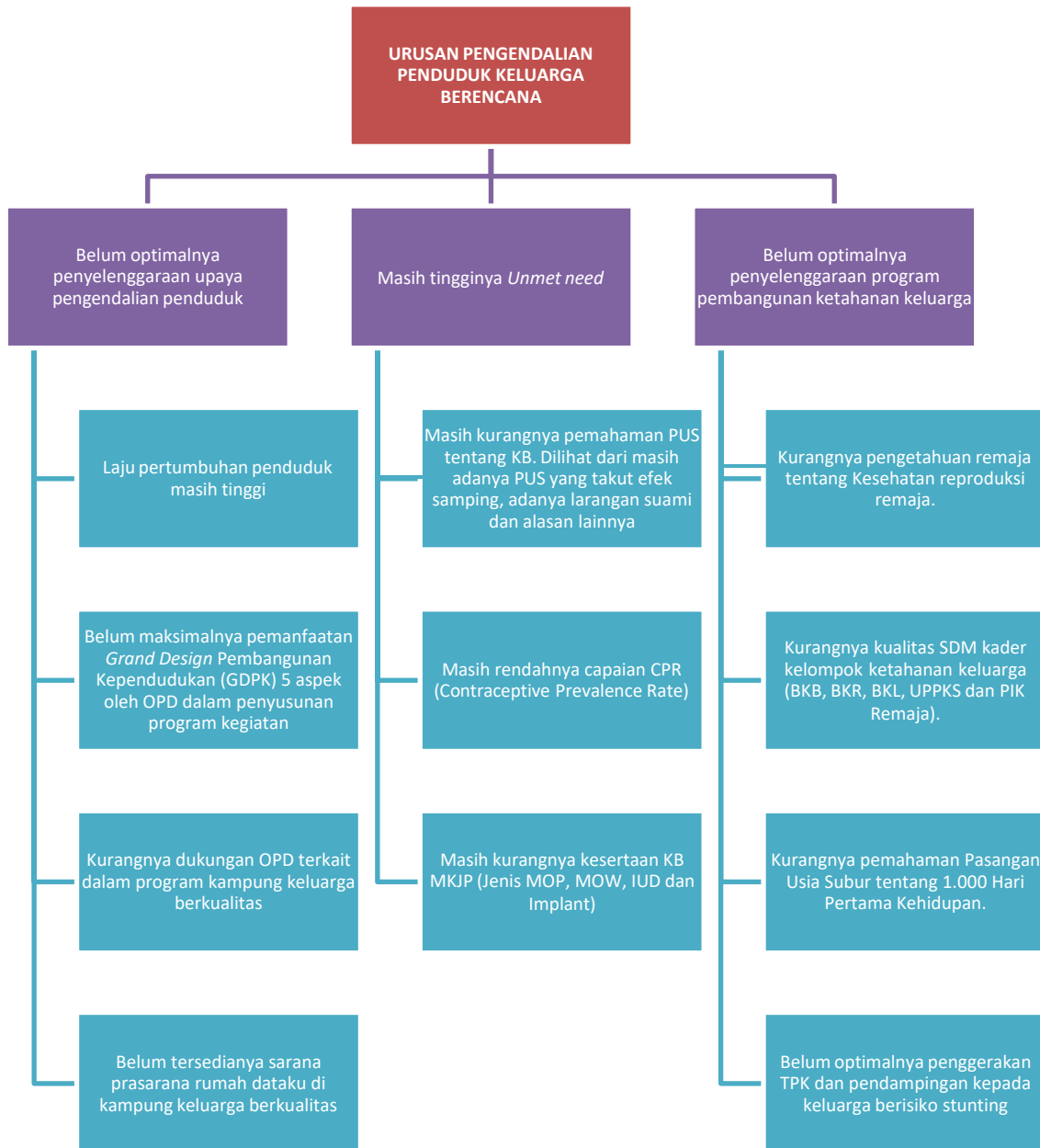


3. Belum optimalnya penyelenggaraan program pembangunan ketahanan keluarga. Pembangunan keluarga menjadi salah satu isu pembangunan Nasional dengan penekanan pada pentingnya penguatan ketahanan keluarga. Perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil di dalam masyarakat menjadi sasaran utama dalam pembangunan keluarga. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera yang hidup dalam lingkungan yang sehat pada setiap tahapan kehidupan, sehingga diperlukan intervensi berbeda namun berkelanjutan. Tantangan pembangunan ketahanan keluarga yang dihadapi Kota Padang Panjang adalah :
- a. Kurangnya pengetahuan remaja tentang Kesehatan reproduksi remaja.
 - b. Kurangnya kualitas SDM kader kelompok ketahanan keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK Remaja).
 - c. Kurangnya pemahaman Pasangan Usia Subur tentang 1.000 Hari Pertama Kehidupan.
 - d. Belum optimalnya penggerakan TPK dan pendampingan kepada keluarga berisiko stunting.



Gambar 3.2

Pohon Masalah Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana



URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Belum optimalnya pembangunan *responsive* gender di Kota Padang Panjang
Masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah menjadi perhatian di skala nasional sejak beberapa tahun terakhir. Hal ini telah ditetapkan menjadi salah satu strategi pembangunan sebagaimana tercantum pada Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Masalah-masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga termasuk pada 9 (sembilan) agenda perubahan atau lebih dikenal dengan sebutan Nawacita. Permasalahan yang terjadi di dunia perempuan dan anak tidak hanya kekerasan fisik, namun juga psikis, masalah seksual, isu narkoba, *trafficking*, pekerja anak dan pornografi. Isu-isu tersebut menjadi isu di lintas bidang dan sektor. Beberapa masalah mendasar yang perlu diatasi dalam jangka waktu pendek antara lain :
 - a. Belum optimalnya kinerja kelembagaan PUG.
 - b. Masih rendahnya keterwakilan perempuan di legislative
 - c. Masih minimnya sarana dan prasarana publik yang responsif gender dan anak.
 - d. Belum semua *stakeholders* memahami konsep PUG.
2. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan
Kasus kekerasan terhadap perempuan masih saja ditemui setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran masyarakat akan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. Terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT yang dilaporkan ke Dinas Sosial PPKB dan PPPA Kota Padang Panjang. Pada tahun 2022 tercatat 8 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan. Permasalahan yang dihadapi dalam hal ini adalah :
 - a. Belum tersedianya rumah aman saat terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga.
 - b. Belum maksimalnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
 - c. Belum terbentuknya UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.
 - d. Kurangnya edukasi kepada masyarakat tentang perlindungan perempuan.
 - e. Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan.



3. Belum terciptanya Kota Padang Panjang sebagai Kota Layak Anak

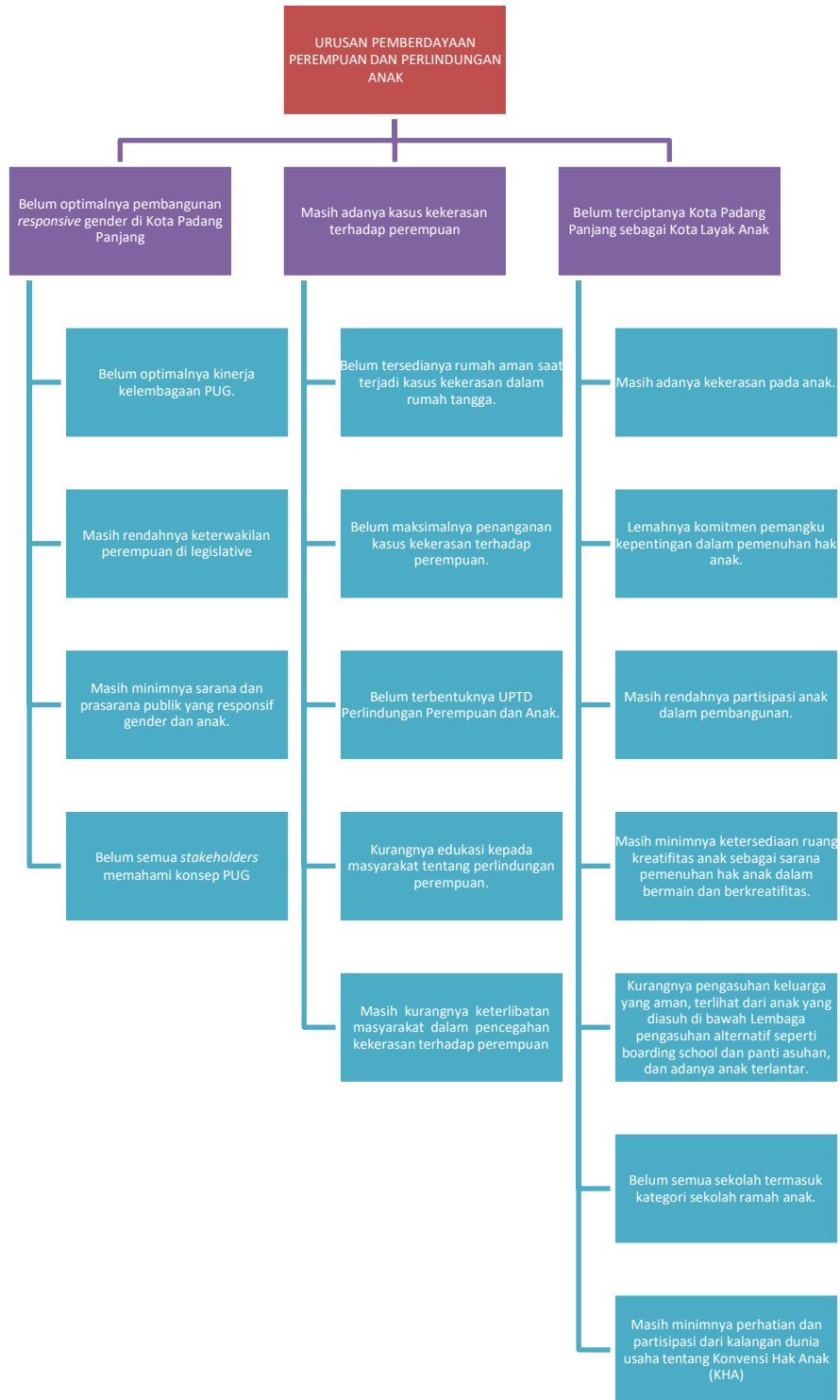
Negara Indonesia telah mengesahkan konvensi tentang Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah dalam upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak secara efektif. Kota Padang Panjang telah mengembangkan Kota Layak Anak secara intensif sejak Tahun 2013, namun masih saja terdapat permasalahan-permasalahan dalam mewujudkan Kota Padang Panjang sebagai Kota Layak Anak, yaitu sebagai berikut :

- a. Masih adanya kekerasan pada anak.
- b. Lemahnya komitmen pemangku kepentingan dalam pemenuhan hak anak.
- c. Masih rendahnya partisipasi anak dalam pembangunan.
- d. Masih minimnya ketersediaan ruang kreatifitas anak sebagai sarana pemenuhan hak anak dalam bermain dan berkreaitifitas. Sarana yang ada saat ini sebahagian besar dikelola oleh swasta dan tidak dapat diakses secara gratis oleh seluruh anak Kota Padang Panjang, seperti sanggar kesenian dan olah raga.
- e. Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di bawah Lembaga pengasuhan alternatif seperti boarding school dan panti asuhan, dan adanya anak terlantar.
- f. Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
- g. Masih minimnya perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha tentang Konvensi Hak Anak (KHA).



Gambar 3.3

Pohon Masalah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang mendukung pencapaian Renstra Kementerian Sosial, Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Renstra BKKBN. Adapun tujuan dan sasaran Kementerian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Tahun 2020-2024 ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 12 Agustus 2021. Adapun garis besar Renstra tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Tujuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan Kemen PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kemen PPPA adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak melalui Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak; dan
- 2) Terwujudnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel.

b. Sasaran Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak, melalui indicator :
 - a) Indeks Pembangunan Gender (IPG);
 - b) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
 - c) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan;
 - d) Indeks Perlindungan Anak (IPA);
 - e) Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP);
 - f) Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA);
 - g) Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif; dan



- h) Persentase daerah dengan peringkat Ramah Perempuan dan Layak Anak (RPLA).
- c. Terwujudnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel, melalui indikator:
 - 1) Indeks Reformasi Birokrasi (RB); dan
 - 2) Opini BPK.

2. Renstra Kementerian Sosial

Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 11 Mei 2020. Adapun garis besar Renstra tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Tujuan Kementerian Sosial

Tujuan akhir yang akan dicapai Kementerian Sosial tahun 2020-2024 melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial, adalah:

- 1) Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan;
- 2) Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional;
- 3) Mewujudkan penguatan tata Kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan public.

Tujuan ini ideal dalam kerangka pembangunan nasional saat ini dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Sosial sesuai Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial.

2. Sasaran Strategis Kementerian Sosial

Sasaran strategis Kementerian Sosial 2020-2024 diarahkan untuk mendukung tujuan Kementerian Sosial, sasaran strategis tersebut adalah:

- 1) Meningkatkan kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan, melalui indikator : Indeks Kesejahteraan Sosial;
- 2) Meningkatkan kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial, melalui indikator:
 - a) Indeks Partisipasi Sosial;
 - b) Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Tersertifikasi;
 - c) Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi;
 - d) Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan rujukan terpadu penanggulangan kemiskinan.



- 3) Meningkatkan berkualitas Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), melalui indikator: Persentase K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan social dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan.
- 4) Terwujudnya tata Kelola kementerian social yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan public, melalui indicator : Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Sosial.

3. Renstra BKKBN

Renstra BKKBN 2020-2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 8 Mei 2020. Adapun garis besar Renstra tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Tujuan BKKBN

Dengan berpedoman pada arah pembangunan Pemerintahan sebagaimana tertera dalam Buku I – RPJMN 2020-2024, BKKBN berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Pembangunan sebagaimana dijabarkan di atas dengan perumusan tujuan :

- 1) Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan Bahagia;
- 2) Mengendalikan struktur penduduk menuju penduduk tumbuh seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.

b. Sasaran Strategis BKKBN

Untuk memastikan tujuan BKKBN dapat tercapai, maka ditetapkan sasaran strategis BKKBN 2020-2024. Sasaran strategis BKKBN adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BKKBN mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya *outcome* dari beberapa program. Bentuk penjabaran tujuan strategis tersebut, BKKBN menetapkan Sasaran Strategis Tahun 2020-2024 yaitu:

- 1) Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024.
- 2) Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024.
- 3) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/UnmetNeed 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024.
- 4) Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age



Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18 per1.000 kelahiran pada 2024. kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*).

- 5) Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024. peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
- 6) Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi.

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang mendukung pencapaian Renstra Perangkat Daerah Provinsi sebagai berikut :

1. Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 menitik beratkan pada peningkatan pelayanan sosial yang difokuskan pada 6 kelompok sasaran permasalahan dengan 8 isu strategis.



Tabel 3.1
Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021-2026

No	Permasalahan	Isu Strategis
1.	Kemiskinan	Masih Tingginya Penduduk Miskin dan Rentan dengan StatusKesejahteraan Terendah di Provinsi Sumatera Barat masih tinggi
2.	Ketelantaran	Masih banyaknya jumlah anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orangtua/keluarga
3.	Kedisabilitasan	Rendahnya aksesibilitas pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas
4.	Korban Bencana	Tingginya resiko bencana alam dan non alam (Bencana Sosial) akibat rusaknya bentang alam dan kondisi geografis daerah kepulauan sepertibanjir,longsor, puting beliung, gelombang pasang dan konflik sosial (Non Alam)
5.	Tuna Sosial	Banyaknya permasalahan sosial tuna susila
6.	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	- Masih rendahnya kompetensi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial - Rendahnya kapasitas dan terbatasnya potensi Lembaga Kesejahteraan Sosial - Belum optimalnya peran dunia usaha dalam pengumpulan sumbangan dana sosial

2. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat

Telaahan terhadap Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :



Tabel 3.2
Telaahan Renstra Dinas P3AP2KB Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Keberdayaan ekonomi perempuan meliputi wawasan, pengetahuan, kecakapan dan keterampilan perempuan dalam mengelola dan mengembangkan usaha	- Pandemi Covid-19 mengakibatkan perempuan kurangnya lapangan usaha skala rumah tangga dan industri rumahan. - Women entrepreneur tidak berdaya dalam menjalankan usaha rumah tangga dan berskala UMKM masa Pandemi Covid-19 - Masih adanya ketimbangan gender dalam bidang pendidikan, pendapatan perempuan dan lapangan usaha. - Praktek budaya dalam pembangunan belum berpihak kepada kesetaraan gender seperti anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi, upah rendah, dan tak usah menjadi pemimpin - Adanya mindset bahwa berperan untuk mencari nafkah adalah laki-laki dan pengasuhan anak sepenuhnya diserahkan kepada perempuan atau ibu. - Masih rendahnya kesadaran perempuan tentang kesetaraan gender untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga dapat mandiri dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan. - Masih rendahnya kemampuan kaum perempuan melibatkan diri dalam program pembangunan, sebagai partisipasi aktif (subjek) dan tidak sekedar menjadi objek pembangunan. - Masih rendahnya kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dan keterlibatan setiap pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana, maupun melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan. - Masih rendah kemampuan	- Sudah adanya kebijakan atau peraturan terkait dengan pembangunan pemberdayaan gender di Sumatera Barat - Adanya Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga - Adanya peraturan daerah tentang penyelenggaraan urusan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak - Adanya komitmen provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mendukung pelaksanaan PUG di daerah - Adanya peraturan terkait dengan kepemimpinan perempuan politik Perempuan menjadi tulang punggung keluarga dalam kehidupan berkeluarga - Budaya matrilineal yang sangat mendorong perempuan dalam meningkatkan ekonomi untuk terwujudnya kualitas hidup perempuan. - Adanya lembaga/ organisasi-organisasi perempuan yang mendorong pemberdayaan perempuan - Adanya komitmen dari Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam percepatan pelaksanaan PUG di Daerah. - Dukungan dari TOGA TOMA dan Bundo Kandung dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender

No	Sasaran Strategis	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			kaum perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun industri besar untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri. - Masih kurangnya peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat local sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara aktif dalam program pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya - Masih rendahnya pencapaian perempuan di legislatif di Sumatera Barat dipengaruhi faktor budaya dimana pola pikir masyarakat mengacu pada adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah mempengaruhi cara mereka dalam menetapkan hak pilihnya	
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Belum Optimalnya Ketahanan Keluarga untuk mewujudkan tatanan sosial yang berbasis adat dan budaya	- Masih terbatasnya sumberdaya pemberian layanan ketahanan keluarga di daerah - Belum optimalnya penyedia layanan ketahanan keluarga - Belum sempurnanya pelaksanaan semua sendi-sendi ketahanan keluarga dalam mewujudkan tatanan sosial yang berbasis adat dan budaya	Adanya peraturan perundang-undangan terkait dengan ketahanan keluarga : - Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga - Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga - Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga
3.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Masih tingginya Angka Perceraian di Sumatera Barat	- Terbatasnya sumberdaya untuk melakukan pendampingan bagi calon pengantin - Belum terlaksananya secara optimal pelaksanaan bimbingan perkawinan Terintegrasi bagi Calon Pengantin, Pasangan Keluarga Muda dan keluarga sakinah - Terbatasnya lapangan usaha baru bagi keluarga dalam masa pandemic Covid-19 - Kesulitan dalam	- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga; - Peraturan Daerah nomor 17 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga - Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang



No	Sasaran Strategis	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			pengembangan usaha ekonomi produktif bagi perempuan kepala rumah tangga	Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga - Tersedianya Tim untuk melatih fasilitator atau pendamping calon pengantin - Ketersediaan dana pendukung kegiatan - Melakukan pendampingan peningkatan ekonomi perempuan marginal atau perempuan kepala keluarga
		Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	- Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak - Terbatasnya sarana Pendukung Pelayanan Di UPTD PPA seperti Rumah Perlindungan - Belum adanya UPTD. PPA di kabupaten/kota. - Terbatasnya Anggaran utk kegiatan Pelayanan kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak - Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak .	- Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak - Terfasilitasinya anggaran dan program / kegiatan - Adanya kebijakan dan peraturan yang mendukung - Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
4.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Belum optimalnya pemenuhan hak hak anak	- Belum terpenuhinya PHA. - Pengambil kebijakan kurang mendukung.	- Adanya P2TP2A dan lembaga anak lain nya yang mendukung program - Terjalannya jejaring antara Dinas/Instansi/PT/LSM /Organisasi
5.	Meningkatnya usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kependudukan	- Rendahnya tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat - Terbatasnya kuantitas dan kualitas aparatur di bidang kependudukan - Belum optimalnya koordinasi program/kegiatan kependudukan antara Pemda dan instansi vertikal serta lintas sektor	- Rendahnya tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat - Terbatasnya kuantitas dan kualitas aparatur di bidang kependudukan - Belum optimalnya koordinasi program/kegiatan kependudukan antara Pemda dan instansi vertikal serta lintas sektor
		Belum optimalnya pencapaian indicator kinerja KB	- Koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi, dan sinergitas dalam pelaksanaan program/kegiatan KKBPK - Terdapat perbedaan persepsi dalam memahami kewenangan provinsi dalam pengembangan desain, pelaksanaan advokasi, dan KIE program KKBPK - Masih terbatasnya anggaran daerah dalam melaksanakan	- Adanya Perka BKKBN No. 3 Tahun 2020 tentang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana - Tersedianya anggaran DAK Non Fisik (BOKB) di Kabupaten/Kota untuk mendukung capaian pelaksanaan program prioritas



No	Sasaran Strategis	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			pelaksanaan urusan PPKB di daerah	KKBPK - Tersedianya anggaran DAK Fisik untuk mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan PPKB daerah dan sesuai dengan prioritas nasional
		Masih terdapat beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan Laju Pertumbuhan Penduduk tinggi dikarenakan tumbuhnya pusat perekonomian baru	- Belum adanya pengarahannya tentang mobilitas penduduk - GDPK belum memiliki dasar hukum - data laju pertumbuhan penduduk kabupaten/kota diperoleh dari proyeksi penduduk BPS, belum melalui data kelahiran, kematian, migrasi atau perpindahan penduduk	- Tersedianya GDPK Provinsi - Belum sinergisnya GDPK Provinsi dan Kabupaten/Kota
		Belum tersedianya database kependudukan berbasis Keluarga dan perlunya pemanfaatan NIK pada database Kependudukan berbasis Keluarga hasil pendataan Keluarga	- Masih kurangnya pemahaman tentang pentingnya penyediaan data kependudukan berbasis NIK - Terdapat ego sektoral dalam penyediaan dan pemanfaatan data kependudukan berbasis NIK	- Tersedianya data base hasil pendataan keluarga tahun 2021 - Tersedianya data SIK Dukcapil berbasis NIK
		tingginya disparitas angka prevalensi kontrasepsi (CPR) dan unmetneed antar wilayah	- Masih rendahnya animo masyarakat dalam penggunaan KB MKJP dan KB pria - Budaya masyarakat yang masih enggan menggunakan alat kontrasepsi	Tersedianya anggaran pengadaan alat dan obat kontrasepsi dari Pusat
		tingginya Peserta KB yang putus pakai (Drop Out) disertai masih rendahnya kesertaan KB MKJP dan KB Pria	- Budaya masyarakat yang masih enggan menggunakan alat kontrasepsi - Masih rendahnya animo masyarakat dalam penggunaan KB MKJP dan KB pria - Belum optimalnya sosialisasi pentingnya penggunaan alokon	Sudah terjalinnya kerjasama antara Praktek Mandiri Bidan dan OPD KB Kabupaten/Kota dalam penyediaan alat obat kontrasepsi
6.	Meningkatnya masyarakat yang mengikuti Program Pembinaan Ketahanan Keluarga	belum optimalnya pengetahuan orang tua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Perubahan struktur dan pola hubungan dalam keluarga	Adanya kebijakan pemerintah dalam pembinaan keluarga balita dan anak
		kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tentang perencanaan/penyiapan kehidupan berkeluarga	kurangnya advokasi dan sosialisasi pentingnya penyiapan kehidupan berkeluarga	Adanya kebijakan untuk membentuk dan mengembangkan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa serta pembinaan keluarga remaja



No	Sasaran Strategis	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		masih lemahnya kualitas hidup lansia dan belum optimalnya kemampuan keluarga dalam melakukan pendampingan perawatan jangka panjang lansia	Belum sinergisnya lintas sektor dalam dalam mengoptimalkan peningkatan kualitas hidup lansia	- Adanya kelompok kegiatan Bina keluarga Lansia di kabupaten/Kota - Tersedianya materi pembinaan lansia dari BKKBN - Adanya posyandu lansia
		Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga	- Belum optimalnya koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi, dan sinergitas dalam pelaksanaan program /kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga - Terdapat perbedaan persepsi dalam memahami kewenangan provinsi dalam pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga - Masih terbatasnya anggaran dalam melaksanakan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga - Belum optimalnya peran advokasi perkawinan. - Masih terjadidisintegrasi pembangunan Keluarga lintas sector pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	- Tersedianya Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga - Adanya dana BOKB dan DAK untuk penggerakan kegiatan kelompok kegiatan

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

Pada hakikatnya tujuan dari penataan ruang kota yaitu adalah untuk mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif. Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW) berfungsi antara lain sebagai: a. Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota. b. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota. Penataan ruang wilayah Kota Padang Panjang bertujuan untuk mengembangkan struktur dan pola ruang Kota Padang Panjang agar mampu mendukung perkembangan pariwisata, pendidikan, pertanian, industri kecil



dan menengah, serta sebagai tempat hunian yang nyaman dalam rangka Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermartabat dan Bermartabat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan. Sejalan dengan itu, tentunya RTRW Kota Padang Panjang dalam setiap proses pembangunan daerah memiliki kedudukan dan pedoman bagi :

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
2. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
3. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
4. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
5. Penataan ruang kawasan strategis kota.

Secara umum permasalahan di bidang penataan ruang yang dihadapi oleh Kota Padang Panjang antara lain yaitu belum lengkapnya peraturan teknis sebagai turunan dari Perda RTRW dalam rangka pelaksanaan penataan ruang di daerah, tata ruang belum sepenuhnya dijadikan acuan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan berbagai sektor, masih lemahnya atau belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang serta masih lemahnya kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Dengan demikian, baik secara langsung maupun tidak langsung RTRW akan berpengaruh terhadap kebijakan yang ada dibawahnya, salah satunya Renstra Dinas Sosial PPKB PPPA Kota Padang Panjang, karena ketentuan RTRW pasti akan berdampak terhadap kehidupan sosial. Berdasarkan telaahan yang dilakukan maka dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DPPPA Provinsi Sumatera Barat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai berikut:



Tabel 3.3

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Sosial PPKB PPPA
Kota Padang Panjang ditinjau dari Implikasi RTRW dan KLHS**

No	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Kurangnya ruang bermain, dan pengembangan kreatifitas bagi anak dan remaja	- Adanya regulasi yang jelas dari pusat hingga daerah tentang pemenuhan hak anak terkait penyediaan ruang bermain, kegiatan budaya dan pemanfaatan waktu luang - Adanya komitmen gugus tugas pengampu
2.	Kurangnya jumlah zona selamat sekolah	Adanya regulasi tentang penyediaan Zona Selamat Sekolah

3.4 Telaahan Terhadap RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

Untuk mendukung terwujudnya Tujuan dan Sasaran RPD Kota Padang Panjang tahun 2024-2026, Dinas Sosial PPKB PPPA Kota Padang Panjang berperan dalam merealisasikan target dari tujuan Pertama yaitu Terwujudnya sumber dayamasyarakat yang berdaya saing dengan sasaran Meningkatnya pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender, pemenuhan hak dan perlindungan anak, dan tujuan keempat yaitu Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis dengan sasaran Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial. Strategi dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender, pemenuhan hak dan perlindungan anak adalah dengan mengoptimalkan peran seluruh stakeholder dalam mendorong dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta pengembangan kota layak anak di Kota Padang Panjang. Sementara untuk menurunkan masalah kesejahteraan sosial, strategi yang akan dilakukan adalah dengan mengoptimalkan layanan perlindungan dan jaminan sosial serta penyediaan basis data yang valid sehingga penyaluran bantuan bagi PPKS dapat dilakukan tepat sasaran.



Tabel 3.4

**Telaahan Terhadap RPD Kota Padang Panjang dengan
Renstra Dinas Sosial PPKB PPPA**

No	Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender, pemenuhan hak dan perlindungan anak	Masih adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang dialami perempuan dalam merasakan manfaat pembangunan	- Masih kurangnya keterwakilan perempuan di parlemen - Belum optimalnya pengembangan kota layak anak untuk mendukung "IDOLA" 2030 - Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan - Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak	- Adanya regulasi yang jelas tentang persentase keterwakilan perempuan di legislative - Adanya komitmen kepala daerah dan anggota Gugus Tugas Kota Layak Anak dalam pengembangan Kota Layak Anak - Sudah terjalannya kerjasama dengan dunia usaha untuk peningkatan pemenuhan hak anak - Adanya kebijakan dan peraturan yang mendukung - Adanya peran niniak mamak dan tokoh adat dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak - Telah terbentuknya PATBM sebagai garda terdepan penanganan kasus anak di masing-masing kelurahan. - Adanya peran niniak mamak dan tokoh adat dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
2.	Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial	Belum optimalnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap PPKS	- Belum optimalnya pelayanan rehabilitasi sosial - Masih adanya PPKS yang belum tertangani - Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam penanganan masalah sosial	- Adanya komitmen pemangku kepentingan dalam optimalisasi pelayanan rehabilitasi sosial - Adanya peranan dunia usaha dalam partisipasi pemenuhan kebutuhan dasar PPKS - Adanya sarana KIE untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah sosial

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam tugas dan fungsi OPD, Isu-isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial PPKB PPPA Kota Padang Panjang, beberapa isu strategis yang perlu menjadi pertimbangan di dalam menyusun Renstra Dinas Sosial PPKB PPPA Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

1. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Pengarusutamaan Gender, pengarusutamaan hak anak dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
4. Percepatan penanganan penurunan stunting.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Dinas Sosial PPKB PPPA Kota Padang Panjang yang telah dituangkan pada Bab III, serta tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial PPKB PPPA, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Tahun 2024-2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Sosial PPKB PPPA Kota Padang Panjang dalam kurun waktu tiga tahun kedepan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.



Tabel 4.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD Dinas Sosial
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI EKSISTING (2022)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
1.	Menurunnya masalah kesejahteraan sosial		Angka PPKS	5,68	4,68	4,49	4,30
		Meningkatkan cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial	Persentase PPKS yang tertangani	69,82	80	82,5	85
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak		1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2. Predikat KLA	(69,44) Nindya	(71,44) Utama	(73,05) Utama	(75,06) Utama
		Meningkatkan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak	Predikat APE	Pratama	Madya	Nindya	Nindya
		Meningkatkan pemenuhan hak Anak	Persentase indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar	79,88	83,5	87	90
3.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Prevalensi Stunting	16.80	14.00	12.60	11.20

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI EKSISTING (2022)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
					2024	2025	2026
		Meningkatkan aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting	Persentasi Pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan 1000 HP kehidupan	66,73	70	72,5	75
	Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk dan KB		Indeks Pembangunan Keluarga	54,13	57,5	58,5	60
			Unmeetneed	22,5	22.5	22.3	22
		Meningkatkan pelayanan kependudukan dan Keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	2,40	2,35	2,3	2,25

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan dan penetapan target capaian Renstra Dinas Sosial PPKB PPPA Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 ini dilakukan berdasarkan metode yaitu, metode evaluasi capaian target tahun sebelumnya dan metode proyeksi target berdasarkan potensi daerah Kota Padang Panjang. Tabel 4.1 merupakan tujuan, sasaran, indikator dan target capaian keberhasilan pelaksanaan Kinerja Dinas Sosial PPKB PPPA Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026. Secara lengkap untuk gambaran relasi antara tujuan, sasaran, indikator serta program dapat dilihat pada Gambar 4.1, 4.2 dan 4.3 Cascading Renstra Dinas Sosial PPKB PPPA Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 per urusan.

Gambar 4.1

Cascading Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan OPD 1				
Menurunkan masalah kesejahteraan sosial				
Indikator Tujuan	Satuan	Target		
		Th 1	Th 2	Th 3
Angka PPKS	%	4.68%	4.49%	4.30%

Sasaran OPD 1				
Meningkatkan cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan				
Indikator Tujuan	Satuan	Target		
		Th 1	Th 2	Th 3
Persentase PPKS yang tertangani	%	80.00%	82.50%	85.00%

Program 1						
PEMBERDAYAAN SOSIAL						
Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi Indikator	Satuan	Target		
				Th 1	Th 2	Th 3
Meningkatnya pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan kelembagaan sosial yang aktif	Jumlah PSKS dan kelembagaan sosial yang aktif / jumlah PSKS dan Kelembagaan sosial yang ada x 100 %	%	75	80	85

Kegiatan 1					
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial					
Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
			Th 1	Th 2	Th 3
Meningkatnya kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina	Lembaga	146	148	150

Program 2						
REHABILITASI SOSIAL						
Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi Indikator	Satuan	Target		
				Th 1	Th 2	Th 3
Meningkatnya pelayanan PPKS	Persentase PPKS yang tertangani	Jumlah PPKS yang ada / Jumlah PPKS yang ditangani x 100	%	90	90	90

Kegiatan 2					
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					
Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
			Th 1	Th 2	Th 3
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Orang	750	750	750

Kegiatan 3					
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					
Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
			Th 1	Th 2	Th 3
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PPKS terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Orang	2028	2710	2792

Program 3						
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						
Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi Indkator	Satuan	Target		
				Th 1	Th 2	Th 3
Meningkatnya persentase penanganan rumah tangga miskin	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah masyarakat miskin yang ada / jumlah masyarakat miskin yang mendapat penanganan x 100 %	%	86.98	87.97	90

Kegiatan 4					
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					
Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
			Th 1	Th 2	Th 3
Meningkatnya pelayanan data pengaduan	Jumlah layanan data yang mendukung pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Layanan	8	8	8

Program 4						
PENANGANAN BENCANA						
Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi Indkator	Satuan	Target		
				Th 1	Th 2	Th 3
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	Persentase Korban Bencana yang Tertangani	Jumlah korban bencana yang tertangani / jumlah korban bencana x 100%	%	100	100	100

Kegiatan 5			
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota			
Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target



			Th 1	Th 2	Th 3
Meningkatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan makanan, sandang dan dukungan psikososial kepada korban bencana	%	100	100	100

Kegiatan 6					
Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
			Th 1	Th 2	Th 3
meningkatnya Pemberian pelayanan untuk masyarakat yang terkena bencana	Jumlah anggota TAGANA yang dibina	Orang	30	30	30

Program 5						
PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						
Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi Indikator	Satuan	Target		
				Th 1	Th 2	Th 3
Meningkatnya pengelolaan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persentase taman makam pahlawan yang dipelihara	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara dan dikelola / jumlah Makam Taman Pahlawan yang ada x 100%	%	100	100	100

Kegiatan 7					
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota					
Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
			Th 1	Th 2	Th 3
Meningkatnya Pemeliharaan dan perawatan makam pahlawan	jumlah makam yang dipelihara	Makam	98	98	98

Tujuan OPD 2				
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak				
Indikator Tujuan	Satuan	Target		
		Th 1	Th 2	Th 3



Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	71.44	73.05	75.06
Prediket KLA	Prediket	Utama	Utama	Utama

Sasaran OPD 2				
Meningkatnya pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak				
Indikator Tujuan	Satuan	Target		
		Th 1	Th 2	Th 3
Prediket APE	Prediket	Madya	Nindya	Nindya

Program 8						
PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMERDAYAAN PEREMPUAN						
Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi Indikator	Satuan	Target		
				Th 1	Th 2	Th 3
Meningkatnya 'Persentase organisasi perempuan yang aktif dalam pelaksanaan PUG	Persentase organisasi perempuan yang aktif	Jumlah organisasi perempuan yang aktif / jumlah organisasi perempuan yang ada x 100	%	100	100	100
Meningkatnya peranan organisasi perempuan dalam pembangunan	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	Jumlah kursi yang diduduki perempuan di DPRD / Jumlah kursi yang tersedia di DPRD	%	20	20	20

Kegiatan 8					
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah kewenangan kabupaten / kota					
Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
			Th 1	Th 2	Th 3
Meningkatnya kapasitas OPD tentang PUG	Jumlah OPD yang memiliki data terpilah	OPD	23	23	23
	Jumlah OPD yang menyusun GAP dan GBS	OPD	23	23	23

Kegiatan 9					
Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota					
Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
			Th 1	Th 2	Th 3



Meningkatnya* Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota	Persentase perempuan partai politik yang memperoleh advokasi dan pendampingan kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	%	50	50	50
---	---	---	----	----	----

Kegiatan 10					
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					
Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
			Th 1	Th 2	Th 3
Meningkatnya pengetahuan organisasi perempuan yang dibina	Persentase lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti sosialisasi tentang penanganan kasus	%	100	100	100

Program 7						
PERLINDUNGAN PEREMPUAN						
Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi Indktor	Satuan	Target		
				Th 1	Th 2	Th 3
Meningkatnya upaya pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	Jumlah perempuan dan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan dari petugas terlatih / jumlah perempuan perempuan korban kekerasan yang melapor ke P2TP2A	%	100	100	100

Kegiatan 11					
Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota					
Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
			Th 1	Th 2	Th 3



Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang mendukung perlindungan perempuan	Lembaga	8	8	8
--	--	---------	---	---	---

Kegiatan 12					
Penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota					
Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
			Th 1	Th 2	Th 3
Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	Persentase kasus yang ditindaklanjuti	%	100	100	100

Kegiatan 13					
Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah					
Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
			Th 1	Th 2	Th 3
Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	Jumlah layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/ Kota	Layanan	10	10	10

Sasaran OPD 3				
Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak				
Indikator Tujuan	Satuan	Target		
		Th 1	Th 2	Th 3
Persentase indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar	%	83.50%	87.00%	90.00%

Program 8						
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						
Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi Indkator	Satuan	Target		
				Th 1	Th 2	Th 3
Meningkatnya pemenuhan hak anak di Kota Padang Panjang	Persentase Indikator KLA yang terpenuhi	Jumlah skor KLA Kota Padang Panjang dibagi 1000 x 100%	%	80	83	85

Kegiatan 14					
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					
Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
			Th 1	Th 2	Th 3
Meningkatnya pengetahuan tentang SRA, PRA dan KLA	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam PHA	Lembaga	30	35	40

Kegiatan 15					
Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan Kabupaten/Kota					
Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
			Th 1	Th 2	Th 3
Meningkatnya penyediaan layanan kualitas hidup anak	Persentase Form anak yang dibina	%	50	70	80

Program 9						
PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						
Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi Indikator	Satuan	Target		
				Th 1	Th 2	Th 3
Meningkatnya perlindungan khusus terhadap anak	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	Jumlah anak yang mendapat perlindungan khusus / jumlah anak yang mendapat kekerasan x 100 %	%	100	100	100

Kegiatan 16					
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					
Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
			Th 1	Th 2	Th 3
Meningkatnya pemberian pendampingan terhadap anak yang mendapat kekerasan	Persentase kasus yang ditindaklanjuti	%	100	100	100

Kegiatan 17					
-------------	--	--	--	--	--



Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/ kota					
Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
			Th 1	Th 2	Th 3
Meningkatnya Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/ kota	Persentase monitoring dan evaluasi kasus yang telah ditangani	%	100	100	100

Kegiatan 18					
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
			Th 1	Th 2	Th 3
Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan yang mengikuti penguatan dan pengembangan kapasitas	Lembaga	8	8	8

Tujuan OPD 3				
Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk dan KB				
Indikator Tujuan	Satuan	Target		
		Th 1	Th 2	Th 3
Unmeetneed	%	22.5	22.3	22

Sasaran OPD 4				
Meningkatnya pelayanan kependudukan dan Keluarga Berencana				
Indikator Tujuan	Satuan	Target		
		Th 1	Th 2	Th 3
Rata-rata jumlah anak perkeluarga	%	2.51%	2.50%	2.49%

Program 10						
PENGENDALIAN PENDUDUK						
Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi Indktor	Satuan	Target		
				Th 1	Th 2	Th 3
Meningkatnya perangkat daerah yang memanfaatkan dokumen kependudukan sebagai bahan perencanaan	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan Dokumen Kependudukan sebagai bahan perencanaan	Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan Dokumen Kependudukan sebagai bahan perencanaan / jumlah perangkat daerah yang ada x 100	%	100	100	100

Kegiatan 19					
Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah/Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabuapten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas					
Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
			Th 1	Th 2	Th 3
MeningkatnyaPemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah/Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabuapten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah dokumen kependudukan yang dihasilkan	Dokumen	1	1	1

Kegiatan 20					
Pemetaan Perkiraan pengendalian Penduduk cakupan daerah Kabuapten/kota					
Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
			Th 1	Th 2	Th 3
Meningkatnya ' Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya Lokal	Jumlah rumah dataku yang dikembangkan	unit	16	16	16

Program 11						
PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						
Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi Indikator	Satuan	Target		
				Th 1	Th 2	Th 3
Meningkatnya pembinaan keluarga berencana	Persentase CPR	peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah PUS x 100	%	62	65	67

Kegiatan 21					
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya Lokal					
Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
			Th 1	Th 2	Th 3
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya Lokal	Jumlah Peserta KB Baru dan Pembinaan Peserta KB Aktif	orang	2450	2450	2480



Kegiatan 22					
Pendayaangunaan Tenaga Penyuluh KB (Petugas Lapangan KB)					
Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
			Th 1	Th 2	Th 3
Pendayaangunaan Tenaga Penyuluh KB (Petugas Lapangan KB)	Jumlah PKB, Kader IMP yang dibina	orang	99	99	99

Kegiatan 23					
Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kab/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB.					
Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
			Th 1	Th 2	Th 3
Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kab/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB.	Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB	%	50	50	50

Tujuan OPD 4				
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat				
Indikator Tujuan	Satuan	Target		
		Th 1	Th 2	Th 3
Prevalensi Stunting	%	12.00	12.00	11.20

Sasaran OPD 5				
Meningkatnya aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting				
Indikator Tujuan	Satuan	Target		
		Th 1	Th 2	Th 3
Persentase Pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HP kehidupan	%	70.00%	72.50%	75.00%

Program 12						
PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						
Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi Indikator	Satuan	Target		
				Th 1	Th 2	Th 3
meningkatnya pelaksanaan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana	Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan Ketahanan Keluarga	Jumlah kelompok ketahanan keluarga yang mengikuti kegiatan ketahanan keluarga / jumlah kelompok ketahanan keluarga yang ada x 100 %	%	62	65	67



Kegiatan 23					
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga					
Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
			Th 1	Th 2	Th 3
Meningkatnya pembangunan keluarga tribina	Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	kelompok	114	114	114

Kegiatan 24					
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					
Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
			Th 1	Th 2	Th 3
Meningkatnya pengetahuan stakeholder dalam penanggulangan stunting	Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB	%	100	100	100



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan yang disusun merupakan strategi dan kebijakan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPD Kota Padang Panjang. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan tujuan, sasaran Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini.



Tabel 5.1

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

Tujuan Daerah	Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis		
Sasaran Daerah	Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial		
Tujuan OPD	Sasaran OPD	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunnya masalah kesejahteraan sosial	Meningkatkan cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial	1. Mengoptimalkan layanan perlindungan dan jaminan sosial	1. Melaksanakan verifikasi dan validasi data DTKS secara Berkala
			2. Peningkatan SDM pengelola data
		2. Meningkatkan pemberdayaan kepada potensi sumber kesejahteraan sosial	1. Peningkatan kapasitas SDM potensi sumber kesejahteraan sosial
		3. Mengoptimalkan penanganan dan pemberdayaan PPKS	2. Mengoptimalkan penanganan PPKS sesuai standar SPM
			3. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang penanganan PPKS
			4. Memaksimalkan pengelolaan rumah healing
			5. Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait terkait penanganan PPKS
			6. Meningkatkan capacity building PPKS
		4. Mengoptimalkan penanganan bencana	1. Menyediakan personel tagana dan peningkatan kapasitas TAGANA.
			2. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang TAGANA
			3. Penyediaan bantuan sosial pasca bencana
	Meningkatkan peran serta kelompok/lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan	Optimalisasi peran serta kelompok/ lembaga sosial kemasyarakatan dalam Pembangunan	1. Peningkatan kapasitas lembaga kelompok kemasyarakatan
			2. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan lembaga kelompok kemasyarakatan

Tujuan Daerah	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing		
Sasaran Daerah	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender, pemenuhan hak dan perlindungan anak		
Tujuan OPD	Sasaran OPD	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Meningkatkan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak	1. Meningkatkan upaya perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan	1. Meningkatkan SDM tim penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
			2. Meningkatkan pemantauan dan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan
			3. Fasilitasi rumah aman
			4. Menginisiasi pembentukan UPTD PPA
			5. Melaksanakan sosialisasi tentang perlindungan perempuan kepada masyarakat dan perangkat kelurahan
		2. Mengoptimalkan pengarusutamaan gender di daerah	1. Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi pada Pokja PUG di masing-masing OPD
			2. Merevitalisasi fungsi forum partisipasi masyarakat
	Meningkatkan pemenuhan hak anak	1. Meningkatkan upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak	1. Koordinasi dan kerjasama dengan OPD dalam pelaksanaan komitmen pemenuhan hak anak
			2. Melaksanakan sosialisasi dan pendekatan dengan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak
			3. Meningkatkan edukasi dan motivasi anak dalam pembangunan
			4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi SRA dan PRA di tingkat PAUD hingga SMP dan Puskesmas
			5. Meningkatkan peran PATBM dan PUSPAGA



Tujuan OPD	Sasaran OPD	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting	1. Optimalisasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga	1. Meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi kepada remaja
			2. Melaksanakan pemilihan duta GenRe
			3. Melaksanakan ajang temu kreativitas remaja
			4. Melaksanakan pelatihan pada kader kelompok ketahanan keluarga
			5. Melaksanakan sosialisasi kepada PUS, Bumil, Busui dan ibu yang memiliki balita
			6. Pendampingan terhadap CATIN melalui kelas ayah bunda
			7. Promosi melalui media KIE tentang 1.000 HPK
			8. Melaksanakan pendampingan oleh TPK kepada keluarga berisiko stunting
			9. Melaksanakan DAHSAT (Dapur Sehat Atasi Stunting) di Kampung KB
Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk dan KB	Meningkatkan pelayanan kependudukan dan Keluarga Berencana	2. Meningkatkan cakupan kesertaan akseptor KB baru	1. Meningkatkan sosialisasi tentang keluarga berencana kepada PUS
			2. Meningkatkan KIE tentang keluarga berencana kepada PUS
			3. Penyediaan alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan pada fasilitas kesehatan
			4. Melaksanakan koordinasi dengan mitra kerja tentang pelayanan KB
			5. Melaksanakan pelayanan KB pada kegiatan bhakti sosial
			6. Peningkatan partisipasi perangkat daerah dalam mendukung program KKBPK melalui kampung KB





BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

Target yang akan dicapai sampai dengan tahun 2026 dijabarkan melalui tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program prioritas perangkat daerah. Disamping itu, juga untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang ditangani oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang, yaitu Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Urusan Pengendalian Penduduk keluarga Berencana.

Program-program yang disertai kebutuhan pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Padang Panjang dan indicator kinerja yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan pada table 6.1 berikut :



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial PPKB PPPA
Kota Padang Panjang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							7,436,910,537		7,692,893,781		8,221,393,781		23,351,198,099		
							5,069,445,262		5,142,969,762		5,671,469,762				
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	90 %	100 %	5,087,445,262	100 %	5,142,969,762	100 %	5,671,469,762	100 %	15,901,884,786	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	4,055,930,882	100 %	4,055,930,882	100 %	4,055,930,882	100 %	12,167,792,646	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan	518 Orang/bulan	518 Orang/bulan	4,055,930,882	518 Orang/bulan	4,055,930,882	518 Orang/bulan	4,055,930,882	1554 Orang/bulan	12,167,792,646	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	0 %	100 %	18,000,000	0 %	-	100 %	18,500,000	100 %	36,500,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	37 Paket	18,000,000	0 Paket	-	37 Paket	18,500,000	74 Paket	36,500,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	230,391,700	100 %	333,916,200	100 %	333,916,200	100 %	898,224,100	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunkantantor yang disediakan	4 Jenis	4 Paket	5,391,700	5 Jenis	5,391,700	5 Jenis	5,391,700	15 Jenis	16,175,100	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	4 Paket	65,000,000	7 Paket	65,000,000	7 Paket	65,000,000	21 Paket	195,000,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	12 Paket	10,000,000	4 Paket	24,499,500	4 Paket	24,499,500	12 Paket	58,999,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	24 Laporan	150,000,000	24 Laporan	233,025,000	24 Laporan	233,025,000	72 Laporan	616,050,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	1 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	6,000,000	1 Dokumen	6,000,000	2 Dokumen	12,000,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	0 %	100 %	50,000,000	100 %	20,000,000	100 %	530,000,000	100 %	600,000,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	0 Unit	20 Unit	50,000,000	5 Unit	20,000,000	0 Unit	30,000,000	0 Unit	100,000,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	500,000,000	1 Unit	500,000,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 Unit	11 Unit	-	1 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	522,181,680	100 %	522,181,680	100 %	522,181,680	100 %	1,566,545,040	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	36 Laporan	53,893,680	3 Laporan	53,893,680	3 Laporan	53,893,680	3 Laporan	161,681,040	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	12 Laporan	468,288,000	4 Laporan	468,288,000	4 Laporan	468,288,000	12 Laporan	1,404,864,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah ber kondisi baik	100 %	100 %	210,941,000	100 %	210,941,000	100 %	210,941,000	100 %	632,823,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	21 Unit	111,525,000	21 Unit	111,525,000	21 Unit	111,525,000	63 Unit	334,575,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	27 Unit	35,516,000	27 Unit	35,516,000	27 Unit	35,516,000	81 Unit	106,548,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	15 Unit	55 Unit	23,900,000	55 Unit	23,900,000	55 Unit	23,900,000	165 Unit	71,700,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	40,000,000	6 Unit	40,000,000	6 Unit	40,000,000	18 Unit	120,000,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
Menurunnya masalah kesejahteraan sosial	Meningkatkan cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentasi sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif	85 %	75 %	1,069,679,700	80 %	1,269,679,700	85 %	1,269,679,700	85 %	3,609,039,100	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
		1.06.02.2.03	Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina	144 Lembaga	146 Lembaga	1,069,679,700	148 Lembaga	1,269,679,700	150 Lembaga	1,269,679,700	444 Lembaga	3,609,039,100	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	92 Orang	92 Orang	267,222,800	92 Orang	267,222,800	92 Orang	267,222,800	276 Orang	801,668,400	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Lembaga	2 Orang	8,640,000	2 Orang	8,640,000	2 Orang	8,640,000	6 Orang	25,920,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Lembaga	60 Lembaga	700,000,000	60 Lembaga	900,000,000	60 Lembaga	900,000,000	180 Lembaga	2,500,000,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota (Sertifikat)	5 Sertifikat	5 Sertifikat	93,816,900	5 Sertifikat	93,816,900	5 Sertifikat	93,816,900	15 Sertifikat	281,450,700	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang Tertangani	90 %	90 %	873,252,656	90 %	873,711,400	90 %	873,711,400	90 %	2,620,675,456	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	526 Orang	750 Orang	499,541,256	750 Orang	500,000,000	750 Orang	500,000,000	2250 Orang	1,499,541,256	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	459 Orang	459 Orang	200,000,000	459 Orang	200,000,000	459 Orang	200,000,000	1377 Orang	600,000,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	507 Orang	75 Orang	150,000,000	75 Orang	150,000,000	75 Orang	150,000,000	225 Orang	450,000,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	22 Orang	22 Orang	80,000,000	22 Orang	80,000,000	22 Orang	80,000,000	66 Orang	240,000,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang	50 Orang	49,541,256	50 Orang	50,000,000	50 Orang	50,000,000	150 Orang	149,541,256	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan MasyarakatKewenang an Kabupaten/Kota (Orang)	50 Orang	50 Orang	20,000,000	50 Orang	20,000,000	50 Orang	20,000,000	150 Orang	60,000,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti	Jumlah PPKS terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	3285 Orang	2628 Orang	373,711,400	2710 Orang	373,711,400	2792 Orang	373,711,400	2792 Orang	1,121,134,200	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	520 Orang	75 Orang	75,000,000	75 Orang	75,000,000	75 Orang	75,000,000	225 Orang	225,000,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	283 Orang	75 Orang	75,000,000	75 Orang	75,000,000	75 Orang	75,000,000	225 Orang	225,000,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang	5 Orang	10,000,000	5 Orang	10,000,000	5 Orang	10,000,000	15 Orang	30,000,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Orang	30 Orang	120,000,000	30 Orang	120,000,000	30 Orang	120,000,000	90 Orang	360,000,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	6 Dokumen	8 Dokumen	93,711,400	10 Dokumen	93,711,400	12 Dokumen	93,711,400	12 Dokumen	281,134,200	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	85 %	86,98 %	228,029,600	87,97 %	228,029,600	90 %	228,029,600	90 %	684,088,800	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan data yang mendukung pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	3 Layanan	8 Layanan	228,029,600	17 Layanan	228,029,600	17 Layanan	228,029,600	42 Layanan	684,088,800	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	2219 Orang	2169 Orang	79,320,000	2119 Orang	79,320,000	2069 Orang	79,320,000	6357 Orang	237,960,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1165 Keluarga	1300 Keluarga	133,709,600	1271 Keluarga	133,709,600	1034 Keluarga	133,709,600	3605 Keluarga	401,128,800	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang	130 Orang	15,000,000	130 Orang	15,000,000	130 Orang	15,000,000	390 Orang	45,000,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang tertangani	100 %	100 %	153,503,319	100 %	153,503,319	100 %	153,503,319	100 %	460,509,957	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan makanan, sandang dan dukungan psikososial kepada korban bencana	100 %	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	100 %	240,000,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0 Orang	300 Orang	30,000,000	300 Orang	30,000,000	300 Orang	30,000,000	900 Orang	90,000,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0 Orang	300 Orang	30,000,000	300 Orang	30,000,000	300 Orang	30,000,000	900 Orang	90,000,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0 Orang	300 Orang	20,000,000	300 Orang	20,000,000	300 Orang	20,000,000	900 Orang	60,000,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah anggota TAGANA yang dibina	30 Orang	30 Orang	73,503,319	30 Orang	73,503,319	30 Orang	73,503,319	90 Orang	220,509,957	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25 Orang	30 Orang	73,503,319	30 Orang	73,503,319	30 Orang	73,503,319	90 Orang	220,509,957	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
				Pemeliharaan dan rehap bangunan markas komando TAGANA	1 Unit	1 Unit		0 Unit		0 Unit		1 Unit		Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang dipelihara	100 %	100 %	25,000,000	100 %	25,000,000	100 %	25,000,000	100 %	75,000,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah makam yang dipelihara	98 Makam	98 Makam	25,000,000	98 Makam	25,000,000	98 Makam	25,000,000	294 Makam	75,000,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota	98 Makam	98 Makam	25,000,000	98 Makam	25,000,000	98 Makam	25,000,000	294 Makam	75,000,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Meningkatkan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase organisasi perempuan yang aktif	100 Persen	100 Persen	209,580,000	100 Persen	219,580,000	100 Persen	219,580,000	100 Persen	648,740,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
				Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	20 Persen	20 Persen		20 Persen		20 Persen		20 Persen		Dinas Sosial P2KBP3A	
			Pelebagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota	Jumlah OPD yang memiliki data terpilah	23 OPD	23 OPD	30,000,000	23 OPD	40,000,000	23 OPD	40,000,000	69 OPD	110,000,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
				Jumlah OPD yang menyusun GAP dan GBS	23 OPD	23 OPD		23 OPD		23 OPD		69 OPD		Dinas Sosial P2KBP3A	
			Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	23 Perangkat Daerah	23 Perangkat Daerah	30,000,000	23 Perangkat Daerah	40,000,000	23 Perangkat Daerah	40,000,000	69 Perangkat Daerah	110,000,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota	Persentase perempuan partai politik yang memperoleh advokasi dan pendampingan kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	50 %	50 %	30,000,000	50 %	30,000,000	50 %	30,000,000	50 %	90,000,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	26 Lembaga	26 Lembaga	30,000,000	26 Lembaga	30,000,000	26 Lembaga	30,000,000	78 Lembaga	90,000,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti sosialisasi tentang penanganan kasus	100 persen	100 persen	149,580,000	100 persen	149,580,000	100 persen	149,580,000	100 Organisasi	448,740,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan (Lembaga)	12 Lembaga	12 Lembaga		12 Lembaga		12 Lembaga		12 Lembaga	-	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	0 Dokumen	15 Dokumen	149,580,000	15 Dokumen	149,580,000	15 Dokumen	149,580,000	45 Dokumen	448,740,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100 BTJ	100 BTJ	164,502,000	100 BTJ	149,532,000	100 BTJ	149,532,000	100 BTJ	463,566,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang mendukung perlindungan perempuan	8 Lembaga	8 Lembaga	40,000,000	8 Lembaga	30,000,000	8 Lembaga	30,000,000	24 Lembaga	100,000,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 OPD	6 Dokumen	40,000,000	6 Dokumen	30,000,000	6 Dokumen	30,000,000	18 Dokumen	100,000,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota	Persentase kasus yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	104,502,000	100 %	104,502,000	100 %	104,502,000	100 %	313,506,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	0 layanan	10 layanan	104,502,000	12 layanan	104,502,000	12 layanan	104,502,000	34 layanan	313,506,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah	Jumlah layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/ Kota	10 Layanan	10 Layanan	20,000,000	10 Layanan	15,030,000	10 Layanan	15,030,000	30 Layanan	50,060,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	0 Dokumen	15 Dokumen	20,000,000	15 Dokumen	15,030,000	15 Dokumen	15,030,000	45 Dokumen	50,060,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
	Meningkatkan pemenuhan hak anak		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase indikator KLA yang terpenuhi	79,85 %	80 %	111,765,000	83 %	120,620,000	85 %	120,620,000	85 %	353,005,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam PHA	25 Lembaga	30 Lembaga	35,000,000	35 Lembaga	43,855,000	40 Lembaga	43,855,000	105 Lembaga	122,710,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	0 Dokumen	15 Dokumen	35,000,000	15 Dokumen	43,855,000	15 Dokumen	43,855,000	45 Dokumen	122,710,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	0 Organisasi	30 Organisasi		30 Organisasi		30 Organisasi		90 Organisasi	-	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Persentase forum anak aktif	46%	50%	76,765,000	70%	76,765,000	80%	76,765,000	80%	230,295,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
				Persentase lembaga pendidikan yang telah mengembangkan SRA	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		Dinas Sosial P2KBP3A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Persentase lembaga kesehatan yang telah mengembangkan PRA	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		Dinas Sosial P2KBP3A	
			Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	35 Orang	35 Orang	76,765,000	35 Orang	76,765,000	35 Orang	76,765,000	105 Orang	230,295,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	-	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100 BTJ	100 BTJ	329,562,000	100 BTJ	262,137,000	100 BTJ	232,137,000	100 BTJ	823,836,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kasus yang ditindaklanjuti	0 Lembaga	30 Lembaga	62,137,000	30 Lembaga	62,137,000	30 Lembaga	62,137,000	30 Lembaga	186,411,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	0 Orang	10 Orang	22,137,000	10 Orang	22,137,000	10 Orang	22,137,000	10 Orang	66,411,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	0 Dokumen	6 Dokumen	40,000,000	6 Dokumen	40,000,000	4 Dokumen	40,000,000	4 Dokumen	120,000,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/ kota	Persentase monitoring dan evaluasi kasus yang telah ditangani	100 %	100 %	192,425,000	100 %	160,000,000	100 %	120,000,000	100 %	472,425,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	0 Orang	10 Orang	67,125,000	12 Orang	40,000,000	12 Orang		34 Orang	107,125,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	8 Orang	10 Orang	125,300,000	12 Orang	120,000,000	12 Orang	120,000,000	34 Orang	365,300,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan yang mengikuti penguatan dan pengembangan kapasitas	0 Lembaga	8 Lembaga	75,000,000	8 Lembaga	40,000,000	8 Lembaga	50,000,000	24 Lembaga	165,000,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	0 Orang	10 Orang	75,000,000	10 Orang	40,000,000	10 Orang	50,000,000	30 Orang	165,000,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk dan KB	Meningkatkan pelayanan kependudukan dan Keluarga Berencana		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan Dokumen Kependudukan sebagai bahan perencanaan	100 %	100 %	130,000,000	100 %	120,000,000	100 %	137,100,000	100 %	387,100,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah/Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah dokumen kependudukan yang dihasilkan	1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	28,000,000	1 Dokumen	43,000,000	1 Dokumen	111,000,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Implementasi Pendidikan Kependudukan jalur pendidikan formal dan Non Formal	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	20 Kegiatan	20 Kegiatan	20,000,000	25 Kegiatan	23,000,000	30 Kegiatan	23,000,000	75 Kegiatan	66,000,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Sosialisasi tentang Pemanfaatan kajian tentang dampak kependudukan beserta model solusi strategi sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan.	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	0 Organisasi	40 Organisasi	-	40 Organisasi	-	40 Organisasi	-	40 Organisasi	-	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	20 Satuan Pendidikan	20 Satuan Pendidikan	20,000,000	20 Satuan Pendidikan	5,000,000	20 Satuan Pendidikan	20,000,000	60 Satuan Pendidikan	45,000,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Pemetaan Perkiraan penduduk cakupan daerah Kabupaten/kota	Jumlah rumah dataku yang dikembangkan	16 Unit	16 Unit	90,000,000	16 Unit	92,000,000	16 Unit	94,100,000	48 Unit	276,100,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			pengolahan dan pelaporan Data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	12 Dokumen	40,000,000	12 Dokumen	42,000,000	12 Dokumen	44,100,000	36 Dokumen	126,100,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	16 Unit	16 Unit	30,000,000	16 Unit	30,000,000	16 Unit	30,000,000	48 Unit	90,000,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	12 Laporan	20,000,000	12 Laporan	20,000,000	12 Laporan	20,000,000	12 Laporan	60,000,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase CPR	65 %	62 %	295,688,250	65 %	745,440,000	67 %	815,440,000	67 %	1,856,568,250	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya Lokal	Jumlah Peserta KB Baru dan Pembinaan Peserta KB Aktif	2434 Orang	2434 Orang	72,900,000	2450 Orang	55,000,000	2480 Orang	55,000,000	? Orang	182,900,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
		2.14.03.2.01.008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK		4 Laporan	17,900,000	4 Laporan	0	4 Laporan	0	4 Laporan	17,900,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
		2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	7 Dokumen	7 Dokumen	40,000,000	7 Dokumen	40,000,000	7 Dokumen	40,000,000	21 Dokumen	120,000,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
		2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	8 Organisasi	30 Organisasi	15,000,000	30 Organisasi	15,000,000	30 Organisasi	15,000,000	90 Organisasi	45,000,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Pendayaangunaan Tenaga Penyuluh KB (Petugas Lapangan KB)	Jumlah PKB, Kader IMP yang dibina	95 Orang	99 Orang	167,880,000	99 Orang	167,880,000	99 Orang	167,880,000	297 Orang	503,640,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Penggerakan Kader Institusi masyarakat	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	88 Orang	88 Orang	30,000,000	88 Orang	30,000,000	88 Orang	30,000,000	264 Orang	90,000,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Pembinaan IMP dan Program KKBP di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan olehPKB/PLKB	40 Organisasi	86 Organisasi	137,880,000	40 Organisasi	137,880,000	40 Organisasi	137,880,000	40 Organisasi	413,640,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakat tingkat Daerah Kab/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB.	Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB	50 %	50 %	54,908,250	50 %	56,000,000	50 %	56,000,000	50%	166,908,250	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalamPelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3 Organisasi	3 Organisasi	54,908,250	3 Organisasi	56,000,000	3 Organisasi	56,000,000	9 Organisasi	166,908,250	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stuntin		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan Ketahanan Keluarga	60%	62 %	1,202,174,000	65 %	1,095,120,000	67 %	1,165,120,000	67 %	3,462,414,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	114 Kelompok	114 Kelompok	597,560,000	114 Kelompok	552,560,000	114 Kelompok	622,560,000	342 Kelompok	1,772,680,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Promosi dan sosialisasi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (Laporan)	3 Laporan	3 Laporan	75,000,000	3 Laporan	30,000,000	3 Laporan	100,000,000	9 Laporan	205,000,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,, PIK R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/PPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Orang)	223 Kader	223 Kader	522,560,000	223 Kader	522,560,000	223 Kader	522,560,000	669 Kader	1,567,680,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Orientasi/Pelatihan Tekhnis Pelaksana/Kader Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R danPemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	4 Laporan	4 Laporan	-	4 Laporan	-	4 Laporan	-	4 Laporan	-	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Pengadaan Sarana Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Unit	Unit	-	Unit	-	Unit	-	0 Unit	-	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB	100 %	100 %	604,614,000	100 %	542,560,000	100 %	542,560,000	100 %	1,689,734,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	23 Organisasi	23 Organisasi	584,614,000	23 Organisasi	522,560,000	23 Organisasi	522,560,000	69 Organisasi	1,629,734,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang
			Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluargabagi Mitra Kerja	1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	60,000,000	Dinas Sosial P2KBP3A	Kota Padang Panjang

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (UU No. 25/2004 dan PP No. 8 Tahun 2008). Menurut BPKP (2004), indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hal yang dicapai. Secara ringkas indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*). Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Sasaran Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang yang mengacu pada indikator dalam RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sasaran Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024- 2026. Selain itu, indikator kinerja menjadi ukuran keberhasilan visi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Sasaran Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang.

Keberadaan indikator Kinerja yang mengacu RPD sangat penting dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Sasaran Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang. Target kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan.



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang yang
Mengacu pada RPD Tahun 2024 – 2026

No	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
			2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentasi sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif		75 %	80 %	85 %	85 %
2	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina		146 Lembaga	148 Lembaga	150 Lembaga	150 Lembaga
3	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		92 Orang	92 Orang	92 Orang	92 Orang
4	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang
5	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		60 Lembaga	60 Lembaga	60 Lembaga	60 Lembaga
6	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota (Sertifikat)		5 Sertifikat	5 Sertifikat	5 Sertifikat	5 Sertifikat
7	Persentase PPKS yang Tertangani		90 %	90 %	90 %	90 %
8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti		750 Orang	750 Orang	750 Orang	750 Orang
9	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		459 Orang	459 Orang	459 Orang	459 Orang
10	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang
11	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		22 Orang	22 Orang	22 Orang	22 Orang
12	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang
13	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan MasyarakatKewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang



No	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
			2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
14	Jumlah PPKS terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti		2628 Orang	2710 Orang	2792 Orang	2792 Orang
15	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang
16	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang
17	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang
18	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang
19	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		8 Dokumen	10 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
20	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial		86,98 %	87,97 %	90 %	90 %
21	Jumlah layanan data yang mendukung pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota		8 Layanan	17 Layanan	17 Layanan	17 Layanan
22	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata		2169 Orang	2119 Orang	2069 Orang	2069 Orang
23	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		1300 Keluarga	1271 Keluarga	1034 Keluarga	1034 Keluarga
24	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		130 Orang	130 Orang	130 Orang	130 Orang
25	Persentase korban bencana yang tertangani		100 %	100 %	100 %	100 %
26	Persentase pemenuhan makanan, sandang dan dukungan psikososial kepada korban bencana		100 %	100 %	100 %	100 %
27	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang
28	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang
29	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang
30	Jumlah anggota TAGANA yang dibina		30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang
31	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan		30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang



No	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
			2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
	Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)					
32	Pemeliharaan dan rehap bangunan markas komando TAGANA		1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit
33	Persentase TMP yang dipelihara		100 %	100 %	100 %	100 %
34	Jumlah makam yang dipelihara		98 Makam	98 Makam	98 Makam	98 Makam
35	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota		98 Makam	98 Makam	98 Makam	98 Makam
36	Persentase organisasi perempuan yang aktif		100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
37	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD		20 Persen	20 Persen	20 Persen	20 Persen
38	Jumlah OPD yang memiliki data terpilah		23 OPD	23 OPD	23 OPD	23 OPD
39	Jumlah OPD yang menyusun GAP dan GBS		23 OPD	23 OPD	23 OPD	23 OPD
40	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota		23 Perangkat Daerah	23 Perangkat Daerah	23 Perangkat Daerah	23 Perangkat Daerah
41	Persentase perempuan partai politik yang memperoleh advokasi dan pendampingan kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota		50 %	50 %	50 %	50 %
42	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota		26 Lembaga	26 Lembaga	26 Lembaga	26 Lembaga
43	Persentase lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti sosialisasi tentang penanganan kasus		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
44	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan (Lembaga)		12 Lembaga	12 Lembaga	12 Lembaga	12 Lembaga
45	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia		15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen
46	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu		100 BTJ	100 BTJ	100 BTJ	100 BTJ



No	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
			2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
47	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang mendukung perlindungan perempuan		8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga
48	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen
49	Persentase kasus yang ditindaklanjuti		100 %	100 %	100 %	100 %
50	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota		10 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan
51	Jumlah layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/ Kota		10 Layanan	10 Layanan	10 Layanan	10 Layanan
52	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota		15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen
53	Persentase indikator KLA yang terpenuhi		80 %	83 %	85 %	85 %
54	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam PHA		30 Lembaga	35 Lembaga	40 Lembaga	40 Lembaga
55	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota		15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen
56	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha		30 Organisasi	30 Organisasi	30 Organisasi	30 Organisasi
57	Persentase forum anak aktif		0.5	0.7	0.8	0.8
58	Persentase lembaga pendidikan yang telah mengembangkan SRA		100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
59	Persentase lembaga kesehatan yang telah mengembangkan PRA		100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
60	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		35 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang
61	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
62	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu		100 BTJ	100 BTJ	100 BTJ	100 BTJ
63	Persentase kasus yang ditindaklanjuti		30 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga



No	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
			2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
64	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA		10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang
65	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota		6 Dokumen	6 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
66	Persentase monitoring dan evaluasi kasus yang telah ditangani		100 %	100 %	100 %	100 %
67	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan		10 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang
68	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan		10 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang
69	Jumlah lembaga layanan yang mengikuti penguatan dan pengembangan kapasitas		8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga
70	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK		10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang
71	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan Dokumen Kependudukan sebagai bahan perencanaan		100 %	100 %	100 %	100 %
72	Jumlah dokumen kependudukan yang dihasilkan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
73	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal		20 Kegiatan	25 Kegiatan	30 Kegiatan	30 Kegiatan
74	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan		40 Organisasi	40 Organisasi	40 Organisasi	40 Organisasi
75	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal		20 Satuan Pendidikan	20 Satuan Pendidikan	20 Satuan Pendidikan	20 Satuan Pendidikan
76	Jumlah rumah dataku yang dikembangkan		16 Unit	16 Unit	16 Unit	16 Unit
77	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
78	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk		16 Unit	16 Unit	16 Unit	16 Unit
79	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
80	Persentase CPR		62 %	65 %	67 %	67 %



No	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
			2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
81	Jumlah Peserta KB Baru dan Pembinaan Peserta KB Aktif		2434 Orang	2450 Orang	2480 Orang	2480 Orang
82	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK		4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
83	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan		7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen
84	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		30 Organisasi	30 Organisasi	30 Organisasi	30 Organisasi
85	Jumlah PKB, Kader IMP yang dibina		99 Orang	99 Orang	99 Orang	99 Orang
86	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		88 Orang	88 Orang	88 Orang	88 Orang
87	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		86 Organisasi	40 Organisasi	40 Organisasi	40 Organisasi
88	Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB		50 %	50 %	50 %	50 %
89	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		3 Organisasi	3 Organisasi	3 Organisasi	3 Organisasi
90	Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan Ketahanan Keluarga		62 %	65 %	67 %	67 %
91	Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina		114 Kelompok	114 Kelompok	114 Kelompok	114 Kelompok
92	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (Laporan)		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
93	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Orang)		223 Kader	223 Kader	223 Kader	223 Kader



No	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
			2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
94	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)		4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
95	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Unit	Unit	Unit	Unit
96	Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB		100 %	100 %	100 %	100 %
97	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		23 Organisasi	23 Organisasi	23 Organisasi	23 Organisasi
98	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluargabagi Mitra Kerja		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan



BAB VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2024–2026 adalah selama tiga tahun.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2024–2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,



Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Padang Panjang, 14 April 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG**



Drs. OSMAN BIN NUR, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA, NIP. 199690120 198902 1 001

